



KONDISI SOSIAL EKONOMI
Masyarakat
DI LOKASI COREMAP II

Pulau Hinako, Kabupaten Nias:
HASIL BME

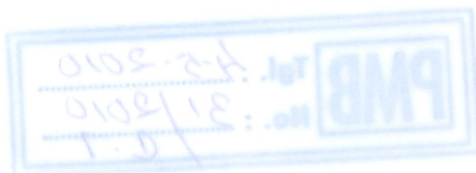


KONDISI SOSIAL EKONOMI
Masyarakat
DI LOKASI COREMAP II

Pulau Hinako, Kabupaten Nias:
HASIL BME

Oleh:

WIDAYATUN
AUGUSTINA SITUMORANG
IGP ANTARIKSA
ALI YANSYAH ABDURRAHIM



COREMAP-LIPI

Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II – LIPI)
Jakarta, 2009



LIPI

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)

Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Pulau Hinako, Kabupaten Nias: Hasil BME/Widayatun, Augustina Situmorang, I G.P. Antariksa, Ali Yansyah Abdurrahim – Jakarta: 2010.

xiii + 66 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8717-34-2

1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333. 911



LIPI

*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI

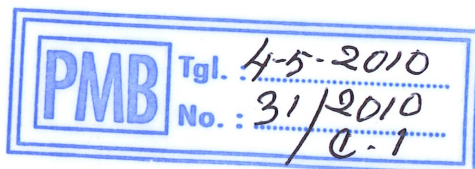
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10

Jakarta Selatan, 12710

Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720

Telp.: (021) 5207205, 5221687

E-mail: ppk-lipi@rad.net.id



KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang, agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, dilindungi dan dikelola secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari aspek bio-fisik dan sosial ekonomi. Terjadinya kecenderungan peningkatan tutupan karang merupakan indikator keberhasilan dari aspek bio-fisik. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi diharapkan pendapatan per-kapita penduduk naik sebesar 2 persen per tahun dan terjadi peningkatan kesejahteraan sekitar 10.000 penduduk di lokasi program.

Untuk melihat keberhasilan tersebut perlu dilakukan penelitian benefit monitoring evaluation (BME) baik ekologi maupun sosial-ekonomi. Penelitian BME ekologi dilakukan setiap tahun untuk memonitor kesehatan karang, sedangkan BME sosial-ekonomi dilakukan pada tengah dan akhir program. BME sosial-ekonomi bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Hasil BME sosial-ekonomi ini dapat dipakai untuk memantau perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan penduduk di lokasi COREMAP. Selain itu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan evaluasi pengelolaan dan pelaksanaan program, baik di tingkat nasional, kabupaten maupun di tingkat lokasi.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T1) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Barat. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di lokasi Pulau Hinako, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, CRITC Kabupaten Nias dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RANGKUMAN

Kepulauan Hinako merupakan salah satu lokasi COREMAP di Kabupaten Nias Barat yang mendapat bantuan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB). COREMAP bertujuan menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi dan dikelola secara berkesinambungan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Keberhasilan COREMAP dapat dikaji dari berbagai aspek, diantaranya dari aspek biofisik dan sosial-ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan akan tercapai peningkatan tutupan karang paling tidak 2 persen per tahun, sedangkan tujuan dari aspek sosial ekonomi diharapkan terjadi peningkatan perkapita sebesar 2 persen per tahun.

Untuk memantau sampai seberapa jauh program telah dilaksanakan dan bagaimana dampaknya terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat, khususnya tingkat pendapatan dilakukan kajian BME (Benefit Monitoring Evaluation) sosial- ekonomi yang dilakukan pada tengah dan akhir program. Survei BME sosial-ekonomi dilakukan untuk mengumpulkan data berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, terutama pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Data dan informasi tentang pendapatan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari hasil BME kemudian dibandingkan dengan data pendapatan yang telah dikumpulkan pada *baseline* studi sosial-ekonomi. Dampak COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dipantau dari hasil perbandingan antara data pendapatan masyarakat hasil *baseline* (T0) yang dilakukan pada awal program dan data pendapatan dari BME yang dilakukan pada tengah dan akhir program (T1).

Sebelum terjadi pemekaran, pengelolaan COREMAP ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias. Pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Nias yang telah berjalan kurang lebih 4,5 tahun secara

umum belum menampakkan hasil yang optimal. Berbagai kegiatan pada masing-masing komponen seperti *public awareness*, edukasi, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan yang telah dilaksanakan menemui berbagai kendala dalam implementasinya yang berakibat pada kurang berhasilnya program.

Berbeda dengan kegiatan di tingkat kabupaten yang sudah cukup beragam, kegiatan di tingkat lokasi, khususnya di Kepulauan Hinako masih minim. Sampai dengan kajian ini dilakukan (bulan Mei 2009) pelaksanaan kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berupa penyaluran dana bergulir belum dilaksanakan. Sedangkan kegiatan COREMAP yang sudah dilakukan diantaranya pembentukan LPSTK dan pemberian dana untuk pembuatan demplot rumput laut dan kegiatan pengawasan. Karena minimnya monitoring, kegiatan pembuatan demplot mengalami kegagalan. Demikian pula kegiatan pengawasan, tidak dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Sementara itu, LPSTK, sebagai pengelola COREMAP di tingkat lokasi, secara umum juga mengalami 'kefakuman' kegiatan. Pengurusnya tidak pernah melakukan pertemuan dan melakukan kegiatan. Selain itu, pengurus juga tidak mendapat bimbingan ataupun dilibatkan dalam berbagai pelatihan seperti pengurus LPSTK di desa-desa lain di Kabupaten Nias.

Keterlambatan pelaksanaan kegiatan di tingkat lokasi ini terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias sebagai pengelola di tingkat kabupaten. Berbagai permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah kurangnya monitoring dan pendampingan baik yang semestinya dilakukan oleh pengelola di tingkat kabupaten maupun oleh LSM yang ditunjuk sebagai pendamping. Selain itu, kefakuman pengelolaan pada saat terjadi pemekaran wilayah kabupaten, menjadi penghambat pelaksanaan berbagai kegiatan di tingkat lokasi.

Setelah terjadi pemekaran, pengelolaan COREMAP diambil-alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh pengelola di tingkat

kabupaten, pengelola di tingkat provinsi juga menemui hambatan dalam pengelolaan program, khususnya terkait dengan kegiatan monitoring. Jarak yang cukup jauh, transportasi yang terbatas serta kendala cuaca menjadi penghambat pelaksanaan monitoring di Kepulauan Hinako.

Hasil BME menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Pendapatan rumah tangga di Kepulauan Hinako naik dari Rp 366.270 pada tahun 2007 menjadi Rp 487.300 pada tahun 2009. Sedangkan pendapatan per-kapita penduduk pada tahun 2007 sebesar Rp 97.300 naik menjadi Rp 130.170 pada tahun 2009. Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan juga mengalami peningkatan dari Rp 330.600 menjadi Rp 789.800. Kenaikan pendapatan ini lebih dikarenakan oleh ketersediaan sumber daya alam dan bagaimana cara masyarakat mengolah dan menggunakannya untuk memperoleh penghasilan melalui usaha pertanian dan perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan intervensi yang sifatnya memberdayakan perekonomian masyarakat melalui penyaluran dana bergulir (yang dilakukan oleh pemerintah dan non – pemerintah) belum banyak dilaksanakan di wilayah ini. Selain itu, sumber pendapatan dari sektor lainnya (perdagangan dan jasa) di Kepulauan Hinako belum berkembang.

Pengaruh program dan kegiatan COREMAP terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga belum ada. Hal ini terkait dengan belum terlaksananya kegiatan mata pencaharian alternatif melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat. Kegiatan COREMAP lainnya yang diharapkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas desa (villae grant) juga belum dilaksanakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vii	
DAFTAR TABEL	ix	
DAFTAR GAMBAR	xi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	4
1.3	Metodologi	5
1.3.1	Lokasi Penelitian	5
1.3.2	Pengumpulan Data	5
1.3.3	Nanalisa Data	7
1.4	Gambaran Umum Lokasi	8
1.5	Organisasi Penulisan	12
BAB II	PENGELOLAAN COREMAP DI KABUPATEN NIAS DAN KEPULAUAN HINAKO	15
2.1	Pengelolaan COREMAP Di Tingkat Kabupaten	16
2.1.1	Kegiatan dan Program	16
2.1.2	Permasalahan dan Kendala	19
2.2	Pengelolaan COREMAP di Kepulauan Hinako	25
2.2.1	Kegiatan dan Program	25
2.2.2	Permasalahan dan Kendala di Pelaksanaan COREMAP di Lokasi	31
BAB III	PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PERUBAHANNYA	35
3.1	Perubahan Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Perkapita	36
3.2	Perubahan Pendapatan Dari Kegiatan Kenelayanan Kenelayanan	40
3.3	Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pendapatan	46

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	53
4.1.	Kesimpulan	53
4.1.1.	Permasalahan dan Kendala dalam Pengelolaan COREMAP di Tingkat Kabupaten dan Provinsi	53
4.1.2.	Permasalahan dan Kendala di Tingkat Lokasi	57
4.1.3.	Gambaran Perubahan Pendapatan Masyarakat dan Faktor yang Berpengaruh	58
4.2.	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kepulauan Hinako Tahun 2007	10
Tabel 2.1	Zona Pengelolaan Sumber Daya Laut Kepulauan Hinako	28
Tabel 3.1	Distribusi Rumah Tangga Terpilih Menurut Besar Pendapatan, di Tiga Desa Lokasi COREMAP di Pulau Hinako, Kabupaten Nias, Tahun 2007 dan 2009 (Persen)	37
Tabel 3.2	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Desa Hinako, Halamona dan Sineneeto (Kep. Hinako) Tahun 2007 dan 2008 (rupiah)	39
Tabel 3.3	Statistik Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Desa Hinako, Halamona dan Sineneeto (Kep. Hinako), 2007-2009	42
Tabel 3.4	Pendapatan Rumah Tangga dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim Desa Hinako, Halamora dan Sineneeto (Kep. Hinako) Tahun 2007 (Rupiah)	45

DAFTAR PETA, BAGAN DAN DIAGRAM

Peta 1.1.	Peta Lokasi Pengamatan Tutupan Karang di Kabupaten Nias	2
Diagram 1.1.	Perbandingan Persentase Tutupan Karang Hidup Tahun 2004, 2005 dan 2007 di Beberapa Titik Pengamatan di Kabupaten Nias	3
Bagan 2.1.	Struktur Organisasi Pelaksana Rencana Pengelola Terumbu Karang LPSTK Fenanda dan Nusantara, Kepulauan Hinako	27
Diagram 3.1.	Perubahan Pendapatan Rumah Tangga dan Per Kapita Tahun 2007-2009 Kepulauan Hinako, Kepulauan Nias	40
Diagram 3.2.	Distribusi Rumah Tangga yang Mempunyai Pendapatan dan Kegiatan Kenelayanan Menurut Kelompok Pendapatan, Tahun 2007	43
Diagram 3.3.	Distribusi Rumah Tangga yang Mempunyai Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Kelompok Pendapatan, Tahun 2009	44
Diagram 3.4.	Pendapatan Rumah Tangga dan Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim Desa Hinako, Halamona dan Sineneeto (Kep. Hinako) Tahun 2007 dan 2009 (Rupiah)	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pulau Nias yang terletak di kawasan Samudera Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang kaya dan unik. Pulau ini sangat terkenal di dunia karena pemandangan pantainya yang indah dengan ombak besar yang sangat disukai oleh para peselancar, baik dari dalam negeri maupun manca negara. Wilayah pantai yang terkenal dengan ombaknya yang sangat cocok untuk bermain selancar, di antaranya, berada di perairan sekitar Teluk Dalam di bagian selatan Pulau Nias. Selain itu, wilayah yang juga sering menjadi tujuan para peselancar dari manca negara adalah pantai-pantai di sekitar Kepulauan Hinako yang terletak di bagian barat Pulau Nias.

Selain terkenal dengan keindahan pantainya dengan ombak yang cocok untuk bermain selancar, perairan di pulau ini juga mempunyai keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Hamparan terumbu karang banyak dijumpai di wilayah perairan di bagian utara, tengah, dan selatan pulau ini. Di sekitar perairan Kepulauan Hinako, misalnya, hidup beragam jenis ikan, baik ikan karang maupun ikan permukaan. Hal ini dibuktikan dengan hasil *underwater fish visual census* (UVC) Tim Ekologi CRITIC-COREMAP tahun 2007. Dari hasil pengamatan tersebut ditemukan 93 jenis ikan karang yang termasuk ke dalam 25 suku dengan jumlah yang melimpah, yaitu sebanyak 3.482 individu ikan karang/Ha, hidup di perairan ini.

Dalam sepuluh tahun terakhir, kondisi terumbu karang di Indonesia pada umumnya dan Pulau Nias pada khususnya telah

mengalami kerusakan dan penurunan tutupan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dari hasil monitoring tutupan karang yang dilakukan oleh CRITC-LIPI dengan menggunakan metode LIT di enam titik pengamatan dapat diketahui bahwa telah terjadi penurunan tutupan karang yang sangat signifikan. Pada tahun 2004, di enam titik yang diamati, tutupan karang berkisar antara 36–63 persen dengan persen tutupan tertinggi di titik pengamatan NIAL 03 yang berada di sekitar perairan pantai Sawo dan tutupan terendah di titik pengamatan NIAL 06 yang berada di perairan dekat Lahewa. Persen tutupan karang menurun drastis setelah terjadi gempa bulan April tahun 2005. Pada pengamatan yang dilaksanakan beberapa bulan setelah gempa, persen tutupan karang di keenam titik tersebut hanya berkisar antara 6-28 persen. Tutupan karang tertinggi di NIAL 02 yang terletak di perairan dekat Sawo dan yang terendah di NIAL 05 di dekat perairan Pulau Lafau. Dua tahun kemudian persentase tutupan karang masih menunjukkan penurunan, meskipun tidak signifikan. Kondisi tutupan karang di keenam titik pengamatan tersebut berkisar antara 4-22 persen (lihat Peta 1.1. dan Diagram 1.1.).

Peta 1.1.
Peta Lokasi Pengamatan Tutupan Karang
Di Kabupaten Nias

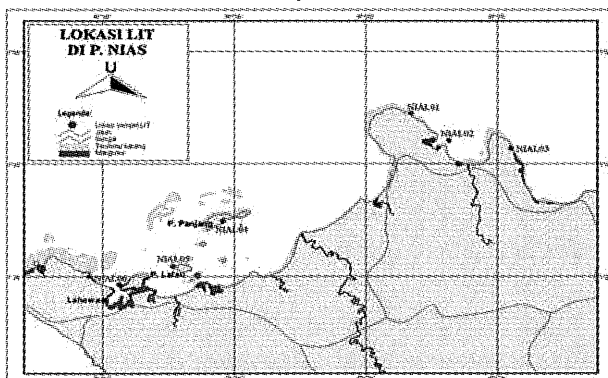
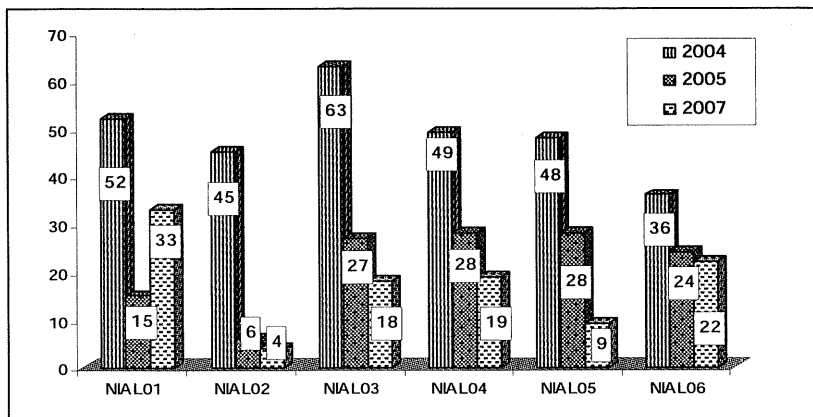


Diagram 1.1
Perbandingan Persentase Tutupan Karang Hidup
Tahun 2004, 2005 dan 2007
di Beberapa Titik Pengamatan di Kabupaten Nias



Sumber: Penelitian Monitoring Terumbu Karang, CRITC-LIPI, 2007.

Untuk mengatasi masalah kerusakan terumbu karang tersebut, wilayah Pulau Nias dijadikan salah satu lokasi COREMAP (*Coral Reef Rehabilitation and Management Program*). Tujuan COREMAP adalah untuk menciptakan pengelolaan ekosistem terumbu karang agar sumber daya laut ini dapat direhabilitasi, diproteksi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat tercapainya tujuan COREMAP antara lain adalah melihat aspek biofisik dan sosial ekonomi. Dari aspek biofisik diharapkan tercapai peningkatan tutupan karang paling sedikit dua persen per tahun. Selanjutnya, indikator keberhasilan COREMAP dari aspek sosial ekonomi adalah (i) pendapatan per kapita masyarakat di lokasi target COREMAP naik sebesar dua persen per tahun dan (ii) terdapat

peningkatan taraf hidup sekitar 10.000 rumah tangga pada akhir program (Project Appraisal Document, ADB, 2005).

Kabupaten Nias merupakan salah satu lokasi COREMAP dari tujuh lokasi COREMAP di wilayah Indonesia bagian barat yang dalam pelaksanaannya mendapat bantuan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB). Pelaksanaan COREMAP di kabupaten ini dilakukan di tiga kawasan, yaitu kawasan Lahewa, Sawo dan Hinako. Pelaksanaan COREMAP di Kawasan Lahewa dan Sawo sudah dimulai sejak COREMAP Fase I. Berbagai kegiatan sudah dilaksanakan di dua kawasan ini, diantaranya, adalah sosialisasi tentang COREMAP, pembentukan kelembagaan (LPSTK dan POKMAS), usaha ekonomi produktif (UEP), serta kegiatan pengawasan dan perlindungan laut (konservasi).

Kawasan Kepulauan Hinako yang berada di wilayah Kecamatan Sirombu merupakan lokasi baru yang ditetapkan pada tahun 2006. Seperti juga kawasan lainnya, berbagai program dan kegiatan COREMAP, seperti sosialisasi dan edukasi, pengelolaan berbasis masyarakat melalui kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP), serta pengawasan dan konservasi harus dilaksanakan di lokasi ini. Namun demikian, sampai dengan tahun 2009 kegiatan COREMAP yang dilakukan di kawasan ini masih sangat sedikit. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh implementasi COREMAP di kawasan Kepulauan Hinako serta permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya dilakukanlah kajian BME sosial ekonomi ini.

1.2. TUJUAN

Tujuan Umum

Mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Khusus:

- Mengidentifikasi permasalahan dan kendala pelaksanaan COREMAP di daerah (tingkat kabupaten dan lokasi)
- Mengkaji pemahaman masyarakat mengenai program COREMAP
- Menggambarkan tingkat pendapatan masyarakat untuk memantau dampak program COREMAP terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.3. METODOLOGI

1.3.1. Lokasi Penelitian

Seperti baseline studi yang dilakukan sebelumnya, kajian BME sosial ekonomi ini dilakukan di Kepulauan Hinako, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias. Di Kepulauan Hinako, terdapat dua belas desa, di antaranya, yaitu Desa Balafondrate, Hinako, Sineneeto, Hanofa, Lahafa dan Halamona. Mengingat banyaknya desa di Kep. Hinako dan mempertimbangkan keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya, maka kajian BME sosial ekonomi ini difokuskan di tiga desa sebagai sampel studi. Tiga desa tersebut adalah Hinako, Sineneeto, dan Halamona. Pemilihan kampung sebagai sampel penelitian dilakukan secara *purposive* dengan mempertimbangkan beberapa faktor, di antaranya: ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya laut, khususnya terumbu karang, dan keterwakilan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

1.3.2. Pengumpulan Data

1. Data primer

Studi ini menggunakan dua pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data kuantitatif

dilakukan dengan melakukan survei, sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara terbuka, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan pengamatan lapangan (observasi).

Survei dilakukan terhadap semua rumah tangga yang ada di ketiga desa tersebut, yaitu Desa Hinako, Sineneeto, dan Halamona. Ada 83 rumah tangga yang berhasil diwawancarai, yaitu 48 rumah tangga di Desa Hinako, 28 rumah tangga di Desa Halamona dan 7 rumah tangga di Desa Sineneeto.

Dibandingkan dengan hasil survei yang dilakukan pada saat melakukan baseline studi, jumlah rumah tangga yang berhasil diwawancarai pada tahun 2009 berkurang. Survei yang dilakukan pada tahun 2007 berhasil mewawancarai sekitar 96 rumah tangga. Berkurangnya jumlah rumah tangga tersebut disebabkan adanya beberapa rumah tangga yang pindah ke daerah lain.

Dalam pengumpulan data kuantitatif tersebut, peneliti dibantu oleh delapan orang pewawancara yang direkrut dari penduduk lokal. Di Desa Hinako dan Sineneeto sebanyak lima orang dan di Desa Halamona sebanyak tiga orang. Pewawancara yang direkrut tersebut sebagian besar merupakan pewawancara yang telah membantu tim peneliti pada saat melakukan baseline studi tahun 2007.

Sebelum pelaksanaan survei, dilakukan pelatihan untuk para pewawancara. Pelatihan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada pewawancara tentang maksud dan tujuan pengambilan data, tata cara berkunjung ke responden, dan cara-cara menanyakan dan mengisi kuesioner.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan sendiri oleh peneliti. Wawancara terbuka dilakukan terhadap berbagai informan kunci, seperti nelayan, baik pria maupun wanita; pedagang pengumpul; pemuka masyarakat, seperti perangkat desa dan guru; serta tokoh masyarakat lainnya. Wawancara terbuka dan

diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang telah dipersiapkan sebelumnya. Sedangkan, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan-kegiatan penduduk setempat yang berkaitan dengan kenelayanan maupun mata pencaharian alternatif lainnya, seperti pembuatan perahu dan pedagang kebutuhan sehari-hari.

Pengumpulan data kualitatif ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai berbagai aspek menyangkut kondisi kehidupan masyarakat dan kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya laut, khususnya terumbu karang. Selain itu, pengumpulan data kualitatif ini juga untuk melengkapi dan menggali lebih dalam lagi berbagai informasi yang telah didapatkan melalui survai.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai instansi terkait, seperti Kantor Statistik Kabupaten, Data Monografi Desa, Dinas Perikanan dan Kelautan, dan data dari berbagai sumber lainnya.

1.3.3. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan tabulasi silang untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Deskripsi data kuantitatif ini didukung dan dikombinasikan dengan pengolahan *field note* dari hasil wawancara terbuka, diskusi kelompok terfokus, dan observasi lapangan serta bahan pustaka lain. Selain itu, dilakukan juga analisis situasi dengan pendekatan kontekstual untuk menerangkan kejadian di lapangan. Analisis ini penting untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi sumber daya laut, khususnya terumbu karang dan pemanfaatannya serta dampaknya terhadap peningkatan pendapatan penduduk.

1.4. GAMBARAN UMUM LOKASI

Kondisi Geografis

Kepulauan Hinako yang mempunyai luas wilayah daratan 35,8 km² dan secara administrasi terletak di Kecamatan Sirombu merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang berjumlah delapan pulau dan letaknya saling berdekatan. Kepulauan Hinako terbentuk karena adanya pengangkatan terumbu karang. Secara geografis, Kepulauan Hinako terletak di bagian barat Pulau Nias dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kedalaman laut antar pulau di kepulauan ini mencapai 45 meter, namun di bagian barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia kedalamannya mencapai 2.000-3.000 meter. Topografi daratan di Kepulauan Hinako, pada umumnya, berbentuk datar, hanya ada sebuah bukit dengan ketinggian mencapai 10 meter di Pulau Hinako. Saat ini, daratan di Kepulauan Hinako mengalami penambahan luas dan ketinggian sebanyak 1-2 meter akibat terjadinya gempa bumi yang diikuti tsunami pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi tanpa diikuti tsunami pada 29 Maret 2005.

Kondisi iklim di Kepulauan Hinako tidak berbeda jauh dengan wilayah Kepulauan Nias lainnya, yaitu iklim hujan tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun. Curah hujan rata-rata bulanan 258 mm atau mencapai 3.102 mm per tahun dengan jumlah hari hujan mencapai 25 hari per bulan. Temperatur rata-rata harian berkisar antara 28-30 °C. Rata-rata kecepatan angin berkisar antara 5-6 knot/jam. Musim hujan yang disertai badai pada umumnya terjadi pada bulan September hingga November. Pada musim ini, ombak di perairan pantai dapat mencapai ketinggian 3-5 meter. Kadangkala badai juga terjadi pada bulan Agustus. Faktor cuaca, seperti angin dan hujan bisa berubah secara mendadak.

Potensi Sumber Daya Alam

Kepulauan Hinako mempunyai sumber daya alam yang sangat kaya, baik perairan lautnya maupun daratannya. Beragam jenis terumbu karang, ikan, dan biota laut lainnya hidup di perairan laut kepulauan ini. Tidak kurang dari 44 jenis terumbu karang dengan total luasan ekosistem terumbu karang mencapai 984,4 Ha, meliputi *fringing reef* 578,26 Ha dan *patch reef* mencapai 406,22 Ha, tersebar di sepanjang garis pantai di kepulauan ini. Ada 93 jenis ikan karang yang termasuk ke dalam 25 suku dengan jumlah yang melimpah, yaitu sebanyak 3482 individu ikan karang/Ha, hidup di perairan ini. Jenis ikan karang yang sering ditangkap adalah kakap, kerapu, lobster, dan teripang. Sedangkan, jenis ikan permukaan yang sering ditangkap adalah tenggiri, cakalang, dan tongkol (Tim CRITIC COREMAP II-LIPI, 2007).

Tanaman kelapa merupakan sumber daya alam yang hidup dominan di daratan Kepulauan Hinako. Tanaman lainnya yang ditanam oleh penduduk Kepulauan Hinako adalah cengkeh, coklat, karet, sawo, tebu, pisang, pepaya, pakis, sirih, ubi jalar, dan sayur-sayuran dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Sedangkan, semak belukar dan rerumputan tumbuh liar dengan sendirinya. Salah satu jenis semak belukar tersebut bisa diolah menjadi minyak nilam. Khusus di Pulau Bawa terdapat pohon sagu, enau, dan bambu.

Kepulauan Hinako juga mempunyai potensi pariwisata yang bisa dikembangkan. Keindahan pantai dan kondisi lautnya yang bersih dan jernih bisa menarik para wisatawan yang menyukai wisata pantai. Ekosistem mangrove bisa dimanfaatkan untuk pariwisata yang bersifat edukatif. Keindahan Ekosistem terumbu karang, terutama di daerah perlindungan laut (DPL), bisa menarik wisatawan yang menyukai pemandangan bawah laut dengan menyelam. Tingginya gelombang ombak di Pulau Bawa dan Pulau Asu bisa menarik para peselancar ke kawasan ini. Danau

kecil di Pulau Hinako dan Pulau Bawa bisa dikembangkan menjadi wisata air. Rumah bekas kediaman Raja Nako yang berarsitektur Bugis dan keberadaan Goa Togemaru yang menjadi saksi bisu sejarah kehidupan di Kepulauan Hinako juga merupakan potensi wisata budaya dan sejarah.

Kependudukan

Jumlah penduduk Kepulauan Hinako pada tahun 2007 mencapai 3.028 jiwa, terdiri dari 1.469 laki-laki dan 1.559 perempuan. Penduduk tersebar di 12 desa yang berada di empat pulau utama, yaitu Pulau Hinako, Pulau Imana, Pulau Bawa, dan Pulau Bogi.

Tabel 1.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk
di Kepulauan Hinako Tahun 2007

Desa	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Dusun	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Total
Bawasalo'o	6,25	2	152	180	332
Imana	2,75	2	106	122	228
Kafo-kafo	3,75	1	61	71	132
Tuwa-tuwa	2,50	1	140	130	270
Bawasawa	6,25	2	183	144	327
Pulau Bogi	4,00	2	57	59	116
Balafondrate	0,90	2	118	134	252
Sineneeto	3,25	2	107	121	228
Hinako	0,90	1	225	252	477
Lahawa	3,25	1	47	57	104
Hanofa	0,75	2	194	198	392
Halamona	1,25	1	79	91	170
Jumlah	35,8	19	1.469	1.559	3.208

Sumber: Data Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias, Februari 2007

Pulau Hinako merupakan pulau yang berpenduduk paling besar (1.623 jiwa), tersebar di enam desa, yaitu Balowondrate (252

jiwa), Sinene'eto (228 jiwa), Hinako (477 jiwa), Lahawa (104 jiwa), Hanofa (392 jiwa), dan Halamona (170 jiwa). Penduduk Pulau Imana berjumlah 560 jiwa, tersebar di dua desa, yaitu Bawasalo'o (332 jiwa) dan Imana (228 jiwa). Kemudian, penduduk Pulau Bawa berjumlah 729 jiwa tersebar di tiga desa, yaitu Kafo-kafo (132 jiwa), Tuwa-tuwa (270 jiwa), dan Bawasawa (327 jiwa). Sedangkan Pulau Bogi yang hanya terdiri dari satu desa hanya dihuni oleh 116 jiwa.

Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di kepulauan ini sangat terbatas. Sarana pendidikan formal di Kepulauan Hinako hanya terdiri dari tiga SD dan satu SMP. Dua SD berada di Pulau Hinako, yaitu di Desa Hinako dan Desa Hanofa, serta satu SD berada di Pulau Bawa, yaitu di antara Desa Kafo-kafo dan Desa Bawasawa. Sedangkan, satu SMP berada di Desa Lahawa, Pulau Hinako yang bernama SMP Swasta Nusantara. Untuk sarana kesehatan, kepulauan ini hanya memiliki satu puskesmas pembantu dengan satu orang mantri sebagai petugas kesehatannya. Fasilitasnya pun sangat sederhana sehingga puskesmas pembantu ini tidak bisa melayani pasien yang membutuhkan pengobatan dan perawatan intensif.

Kepulauan yang kaya dengan potensi sumber daya alam ini pun tidak memiliki sarana ekonomi yang memadai. Tidak adanya tempat pelelangan ikan (TPI) dan teknologi pascapanen membuat pemasaran hasil laut masih dilakukan secara tradisional dengan menjual langsung kepada konsumen di Kepulauan Hinako atau jika hasilnya melimpah, nelayan akan menjualnya ke Sirombu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, penduduk di kepulauan ini hanya mengandalkan pasar kecil yang berlokasi di dekat dermaga Desa Hinako dan warung-warung yang ada di sekitar rumah mereka.

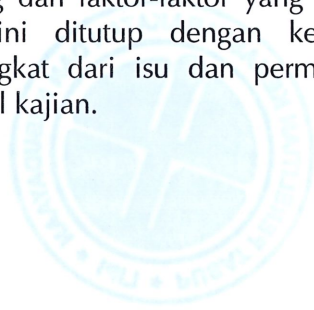
Sarana transportasi utama antarpulau di Kepulauan Hinako ataupun untuk menuju Pelabuhan Sirombu di Pulau Nias menggunakan dua kapal motor besar berkapasitas 10 ton. Dua kapal motor ini beroperasi secara rutin setiap hari. Selain kapal motor besar berkapasitas 10 ton, digunakan juga kapal motor tempel dengan kapasitas 12 orang. Kapal motor tempel ini tidak beroperasi secara rutin, tetapi beroperasi ketika ada permintaan atau ketika salah satu kapal motor besar tidak beroperasi secara normal. Selain penggunaan kapal motor, digunakan juga perahu dayung sebagai alat transportasi antarpulau yang berdekatan. Biasanya, perahu dayung ini digunakan untuk menuju lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan yang letaknya berada di pulau lain.

Untuk transportasi di daratan, sebagian besar penduduk melakukannya dengan berjalan kaki. Luas pulau yang tidak terlalu luas menyebabkan seluruh wilayah pulau bisa dijangkau dengan hanya berjalan kaki. Selain berjalan kaki, beberapa penduduk menggunakan alat transportasi darat yang tersedia, seperti sepeda, gerobak, dan sepeda motor yang jumlahnya hanya ada dua buah, yaitu milik kepala sekolah dan inventaris mantri puskesmas. Jalan yang digunakan sebagai penghubung antardesa adalah jalan setapak yang melintasi pemukiman dan perkebunan milik penduduk. Kondisi jalan tersebut beragam, ada yang sudah ditembok, ada yang sudah diberi batu-batu karang, dan ada yang masih berupa tanah.

1.5. ORGANISASI PENULISAN

Laporan kajian BME sosial ekonomi masyarakat di lokasi COREMAP ini terdiri dari empat bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang perlunya kajian ini, tujuan penelitian, serta metode dan analisis data yang digunakan. Selain itu, di dalam pendahuluan juga disajikan profil singkat lokasi penelitian. Pelaksanaan COREMAP di tingkat

kabupaten dan di tingkat lokasi, Kepulauan Hinako, dipaparkan pada Bab II. Bab III berisi paparan mengenai pendapatan masyarakat, khususnya pendapatan dari kegiatan ekonomi berbasis terumbu karang dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Laporan ini ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi yang diangkat dari isu dan permasalahan yang muncul berdasarkan hasil kajian.





BAB II

PENGELOLAAN COREMAP DI KABUPATEN NIAS DAN KEPULAUAN HINAKO

Keberhasilan kegiatan COREMAP sangat berkaitan dengan kinerja pengelolaan program, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat lokasi (desa) program tersebut dilaksanakan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan COREMAP sangat dipengaruhi oleh kinerja pengelola COREMAP. Wilayah yang pengelolanya aktif melakukan sosialisasi, supervisi, dan pendampingan, pada umumnya, lebih berhasil dari wilayah yang pengelolanya kurang aktif. Bagian ini memaparkan pengelolaan COREMAP di tingkat kabupaten, yaitu Kabupaten Nias, dan di tingkat lokasi, yaitu Kepulauan Hinako. Pada bagian pertama dibahas tentang pelaksanaan COREMAP dengan berbagai permasalahan dan kendalanya di tingkat kabupaten kemudian diikuti dengan pelaksanaan kegiatan COREMAP di kawasan Kepulauan Hinako. Kajian difokuskan pada pelaksanaan kegiatan dan program yang meliputi kegiatan masing-masing komponen dan kerja sama antar komponen/*stakeholders* yang berkepentingan, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang (LPSTK), masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan sebagai pendamping masyarakat.

Informasi yang digunakan dalam bagian ini sebagian besar berasal dari wawancara dengan pengurus LPSTK, LSM pendamping, dan masyarakat di lokasi COREMAP. Selain melalui wawancara, informasi mengenai program dan kegiatan

COREMAP di Kabupaten Nias bisa diperoleh dari laporan tahunan kegiatan COREMAP. Namun pada kenyataannya, informasi dari pengelola COREMAP di DKP Kabupaten Nias sulit diperoleh, padahal DKP Kabupaten Nias merupakan PIU COREMAP Fase II Kabupaten Nias. Beberapa alasan yang dikemukakan, antara lain, adalah semua staf yang bertanggung jawab langsung dengan kegiatan COREMAP pada tahun 2008 tidak lagi bertugas di DKP Kabupaten Nias. Kepala DKP Kabupaten Nias yang ditemui mengaku kurang memahami kegiatan COREMAP karena baru bertugas beberapa bulan setelah sebelumnya bertugas di Dinas Pendidikan.

2.1. PENGELOLAAN COREMAP DI TINGKAT KABUPATEN

2.1.1. *Kegiatan dan Program*

Kegiatan COREMAP di Kabupaten Nias telah dimulai sejak fase I (tahun 1998-2004). Sebagaimana halnya pelaksanaan COREMAP Fase I di wilayah lain, fokus kegiatan pada fase ini adalah sosialisasi dan penyadaran masyarakat (*public awareness*) tentang pentingnya penyelamatan dan pelestarian terumbu karang. Setelah pelaksanaan COREMAP Fase I selesai, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan COREMAP fase II (tahun 2004-2009) yang merupakan fase akselerasi. Tujuan COREMAP Fase II, secara umum, adalah untuk menetapkan sistem pengelolaan terumbu karang yang andal di daerah-daerah prioritas.

Pelaksanaan COREMAP Fase II di Kabupaten Nias, pada awalnya (tahun 2004), hanya difokuskan di dua kawasan, yaitu Kawasan Lahewa (Kecamatan Lahewa) dan Kawasan Sawo (Kecamatan Sawo, sebelum pemekaran merupakan bagian dari Kecamatan Tuhemberua). Masing-masing kawasan dipilih dua desa/kelurahan sebagai lokasi COREMAP, yaitu Kelurahan Pasar Lahewa dan Desa Moawo untuk Kawasan Lahewa, serta Desa Sawo dan Desa Lasara Sawo untuk Kawasan Sawo. Satu tahun

kemudian, pada tahun 2005, terjadi penambahan lokasi di setiap kawasan, masing-masing sebanyak dua desa, yaitu Desa Balefadoro Tuho dan Desa Sihenesi untuk Kawasan Lahewa dan Desa Sisarahili Teluk Siabang dan Desa Sifahandro untuk Kawasan Sawo. Kegiatan COREMAP di Kawasan Kepulauan Hinako (Kecamatan Sirombu) baru dimulai pada tahun 2006. Kawasan Kepulauan Hinako ini terdiri dari dua belas desa, yaitu Hinako, Balowondrate, Sinene'eto, Lahewa, Hanofa, Halamona, Bawasawa, Kafo-kafo, Tuwa-tuwa, Imana, Bawasalo'o, dan Bogi.

Sejak dilaksanakan pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2009, pelaksanaan COREMAP tahap II telah berhasil melaksanakan berbagai program dan kegiatan, seperti sosialisasi program dan kegiatan COREMAP; pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) dan penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK); pembentukan kelompok masyarakat (POKMAS); penguatan kelembagaan; dan pelaksanaan kegiatan berbasis masyarakat, seperti pembuatan demplot budidaya dan pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA) bagi nelayan dan masyarakat pesisir lainnya. Sosialisasi program dan kegiatan COREMAP dilakukan pada tahun 2004 kepada masyarakat di lokasi dan *stakeholders* terkait. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai cara di berbagai media, seperti kampanye melalui radio, pemutaran film, advokasi lintas sektor melalui berbagai pertemuan, pemasangan billboard, serta pembuatan *leaflet* dan brosur.

Pembentukan LPSTK dan penyusunan RPTK pun dilakukan tahun 2004. LPSTK dan RPTK dibentuk di setiap lokasi COREMAP yang terdiri dari satu desa, kecuali di Kepulauan Hinako. Khusus di Kepulauan Hinako yang terdiri dari dua belas desa, LPSTK yang dibentuk hanya dua. Masing-masing LPSTK membawahi enam desa. Setelah terbentuknya LPSTK dan RPTK, kegiatan dilanjutkan dengan penguatan kelembagaan melalui pembentukan POKMAS di masing-masing lokasi. POKMAS

merupakan bagian dari LPSTK. POKMAS yang dibentuk biasanya adalah POKMAS Konservasi, POKMAS Usaha/Produksi, dan POKMAS Wanita. Anggota POKMAS merupakan nelayan dan masyarakat pesisir lainnya yang berada di lokasi/wilayah kerja LPSTK.

Kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan berbasis masyarakat (PBM) dan MCS mulai diimplementasikan pada tahun 2006. Kegiatan tersebut, di antaranya, adalah pemberian dana bergulir untuk kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP). Kegiatan UEP ini kemudian diadopsi menjadi kegiatan MPA. Begitu pun pengadaan berbagai sarana dan prasarana untuk kegiatan pengawasan dilakukan pada tahun 2006. Sarana untuk kegiatan pengawasan tersebut, di antaranya, adalah kapal patroli pengawasan.

Pengembangan kegiatan MPA mulai diintensifkan pada tahun 2007 dengan diawali oleh kegiatan percontohan/demplot budidaya, seperti demplot budidaya kepiting di Kawasan Sawo; demplot budidaya rumput laut di Moawo, Lasara Sawo, dan Kepulauan Hinako; serta demplot pembesaran kerapu di Lahewa. Kegiatan MPA lainnya adalah melanjutkan kegiatan UEP dan melaksanakan budidaya secara massal, seperti budidaya lele di Kawasan Lahewa dan Sawo yang dimulai pada tahun 2008. Kegiatan MPA ini masih terus berlanjut sampai tahun 2009.

Seluruh program dan kegiatan COREMAP di Kabupaten Nias sampai akhir tahun 2008 dilakukan dengan perencanaan dan persiapan yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias melalui DKP Kabupaten Nias yang berada di Gunung Sitoli sebagai PIU COREMAP Fase II Kabupaten Nias. Setelah itu, yaitu mulai tahun anggaran 2009, pengelolaan COREMAP di Kabupaten Nias dilaksanakan oleh DKP Provinsi Sumatera Utara. Hal ini dilakukan setelah terjadinya pemekaran wilayah Kabupaten Nias menjadi dua kabupaten dan satu kota, yakni, Kabupaten Nias Utara (UU No. 45 Tahun 2008), Kabupaten Nias

Barat (UU No. 46 Tahun 2008), dan Kota Gunung Sitoli (UU No. 47 Tahun 2008). Berdasarkan informasi, hal ini dilakukan karena tiga kawasan yang menjadi lokasi COREMAP tersebut berada di dua kabupaten baru yang berbeda. Kawasan Lahewa dan Sawo berada di Kabupaten Nias Utara, sedangkan Kawasan Kepulauan Hinako berada di Kabupaten Nias Barat.

Dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP di semua lokasi, DKP sebagai pengelola di tingkat kabupaten bekerja sama dengan LSM yang ditugaskan sebagai pendamping masyarakat. Di setiap lokasi ditempatkan paling tidak seorang staf LSM yang ditunjuk sebagai fasilitator/pendamping masyarakat yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam membentuk LPSTK, RPTK, POKMAS, pelaksanaan UEP dan kegiatan COREMAP lainnya. Fasilitator/pendamping tersebut diharapkan dapat membantu DKP, LPSTK, dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan COREMAP. Selain itu, sebagai pendamping yang tinggal ditengah-tengah masyarakat di lokasi COREMAP, fasilitator/pendamping juga diharapkan dapat menyampaikan aspirasi dan kendala yang dihadapi masyarakat terkait kegiatan COREMAP. Peranan LSM dan stafnya (fasilitator/pendamping) sangat signifikan dalam menunjang keberhasilan kegiatan COREMAP.

2.1.2. Permasalahan dan Kendala

Pengelolaan COREMAP di Kabupaten Nias yang telah berlangsung dua fase tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala. Dari pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian serta wawancara dengan berbagai narasumber berhasil diidentifikasi beberapa permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan COREMAP. Pada dasarnya sebagian permasalahan dan kendala tersebut telah ditemukan pada kajian BME sosial ekonomi yang dilakukan sebelumnya (tahun 2007), namun

tampaknya belum mendapat perhatian yang serius dari pengelola program.

Dalam kajian ini, permasalahan dan kendala dalam pengelolaan COREMAP di Kabupaten Nias dikelompokkan kedalam dua bagian, yaitu yang terkait dengan DKP Kabupaten Nias sebagai PIU COREMAP Fase II di Kabupaten Nias dan LSM pendamping yang mendampingi/memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan program COREMAP.

- *Permasalahan dan kendala terkait DKP Kabupaten Nias*

1. *Program dan kegiatan lebih banyak bersifat top down.*

Hampir semua jenis dan bentuk kegiatan COREMAP ditentukan oleh DKP Kabupaten Nias tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lokasi COREMAP. Posisi LPSTK dan masyarakat hanya sebagai *policy taker* di lapangan. Akibatnya, beberapa program dan kegiatan tidak cocok dilaksanakan di lokasi dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lokasi. LPSTK dan masyarakat cenderung menerima beberapa tawaran program dan kegiatan dengan terpaksa sehingga hasilnya pun tidak optimal, contohnya program budidaya lele di Kelurahan Pasar Lahewa dan demplot budidaya rumput laut di Desa Moawo.

Dari beberapa narasumber di diperoleh informasi bahwa LPSTK dan masyarakat Pasar Lahewa sebetulnya tidak menginginkan kegiatan usaha budidaya lele dengan alasan masyarakat Kelurahan Pasr Lahewa tidak mau mengkonsumsi ikan lele. Namun, karena sudah diprogramkan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias tetap melaksanakan program tersebut. Akibatnya, kegiatan ini tidak berjalan dengan optimal dan hasil panennya berupa ikan lele tidak bisa dipasarkan.

Hal yang tidak jauh berbeda juga terjadi di Desa Moawo. Menurut narasumber, kondisi pantai Desa Moawo tidak cocok untuk habitat rumput laut. Oleh karena itu tidak mengherankan bila semua rumput laut yang ditanam rusak dan mati karena terkena ombak dan terbawa arus. Seorang narasumber mengatakan, sebenarnya LPSTK dan masyarakat desanya meminta program usaha ternak atau tanaman palawija bukan budidaya rumput laut.

2. *Kewenangan pengelolaan COREMAP di Kabupaten Nias terlalu terpusat di DKP Kabupaten Nias, sementara jarak antara lokasi dengan kantor DKP Kabupaten Nias sangat jauh sehingga apabila ada kasus perusakan terumbu karang ataupun permasalahan dalam pelaksanaan program tidak bisa segera diselesaikan.*

Hal ini, antara lain, dikemukakan oleh narasumber di Desa Muawo yang menerangkan bahwa LPSTK Desa Moawo pernah menemukan kasus penggunaan alat tangkap ikan yang destruktif oleh kapal nelayan dari Sibolga di perairan sekitar desa mereka. Kemudian, mereka melaporkannya ke DKP Kabupaten Nias dan meminta bantuan untuk menangkap kapal tersebut, namun Laporan dan permintaan LPSTK tersebut tidak diindahkan. DKP tidak meresponnya karena alasan jarak dan

3. *Keterbatasan Staf DKP Kabupaten Nias, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas sehingga pengelolaan program COREMAP tidak optimal. Monitoring dan pendampingan program hampir tidak pernah dilaksanakan sehingga beberapa permasalahan di lapangan tidak dapat ditangani dengan cepat dan tepat.*

Hal ini diperburuk lagi dengan sistem rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang

kurang terencana. Pengelola COREMAP, termasuk pimpinan dan staf yang sebelumnya menangani COREMAP dan diberikan pelatihan pengelolaan program COREMAP, dipindahkan dan diganti dengan orang baru yang tidak paham dan tidak mempunyai latar belakang keilmuan ataupun pengalaman yang sesuai. Akibatnya, pengelolaan COREMAP pun menjadi tidak optimal.

4. *Tata kelola program COREMAP, baik di tingkat kabupaten oleh DKP Kabupaten Nias maupun di tingkat lokasi oleh masing-masing LPSTK, tidak berjalan dengan baik.*

Hal ini dibuktikan sulitnya mendapatkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan COREMAP.

5. *DKP Kabupaten Nias kurang melibatkan pemerintahan kecamatan dan desa dalam pelaksanaan program COREMAP.*

Beberapa narasumber di pemerintahan kecamatan dan pemerintah desa lokasi COREMAP mengaku tidak pernah diberi informasi mengenai program dan kegiatan COREMAP di wilayahnya. Oleh karena itu, apabila ada masalah, hambatan, dan keluhan dari masyarakat, mereka tidak dapat berbuat apa-apa.

6. *Keterlambatan pencairan dana APBN untuk pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Nias.*

Pelaksanaan kegiatan dan program COREMAP sangat tergantung pemerintah pusat sebagai penentu kebijakan pendanaan melalui APBN. Parahnya lagi, dana dari pemerintah pusat biasanya turun setelah pertengahan tahun anggaran. Akibatnya, kegiatan dan program baru berjalan di pertengahan tahun, bahkan ada juga yang mendekati akhir tahun anggaran sehingga tujuan dari

kegiatan dan program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

7. *Kegiatan dan program COREMAP masih diperlakukan dan dipahami sebagai proyek dan belum dianggap sebagai program berkelanjutan.*

Akibatnya, apabila jangka waktu dan dananya habis, kegiatan dan program COREMAP tersebut akan berakhir begitu saja tanpa adanya keinginan dilanjutkan secara mandiri.

8. *Perubahan pengelola COREMAP Kabupaten Nias yang tadinya oleh DKP Kabupaten Nias menjadi oleh DKP Propinsi Sumatera Utara*

Perubahan ini memberikan harapan untuk peningkatan pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Nias menjadi jauh lebih baik. Namun, jauhnya jarak antara DKP Propinsi Sumatera Utara dengan lokasi-lokasi COREMAP di Nias memerlukan strategi yang baik agar dapat menghilangkan kekhawatiran bahwa pemindahan ini akan membuat pengelolaan dan komunikasi antara PIU di Kota Medan dan Lokasi COREMAP di Nias semakin sulit.

- ***Permasalahan dan kendala terkait LSM Pendamping***

1. *Sulitnya mendapatkan LSM pendamping dan tenaga pendamping/fasilitator yang profesional.*

Hal ini terjadi karena terbatasnya LSM dan fasilitator di Kabupaten Nias.

2. *Sistem kerjasama antara PIU COREMAP dan LSM pendamping biasanya berupa kontrak selama satu tahun yang kemudian dapat diperpanjang lagi.*

Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya perencanaan dan program yang dilakukan LSM pendamping karena ketidakpastian keberlanjutan kontrak. Selain itu rekrutmen fasilitator pendamping di lapangan yang dilakukan LSM juga berupa sistem kontrak yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, tidak jarang terjadi pergantian fasilitator lapangan karena kontraknya selesai, pemutusan kontrak, atau dan pengunduran diri. Akibatnya, frekuensi pergantian fasilitator lapangan sangat tinggi dan berdampak pada terputusnya keberlanjutan kegiatan pendampingan. Fasilitator lapangan pengganti harus belajar memahami masyarakat serta kegiatan dan program yang sedang berjalan dari awal.

3. *Kurangnya pemahaman LSM pendamping dan fasilitator lapangan tentang misi dan tujuan COREMAP secara komprehensif.*

Pemahaman tentang adanya pembagian tahapan dalam kegiatan COREMAP tampaknya belum sepenuhnya dimengerti oleh LSM pendamping maupun fasilitator lapangan. Meskipun mengaku sudah terlibat kegiatan COREMAP sejak fase I, seorang fasilitator lapangan mengaku belum pernah diberikan informasi mengenai COREMAP secara komprehensif. Informasi yang diberikan umumnya hanya terbatas kepada program dan waktu pelaksanaannya. Tidak seorang pun fasilitator yang diwawancarai paham bahwa seharusnya COREMAP fase II ini merupakan tahap akselerasi, sedangkan COREMAP tahap I adalah tahap sosialisasi dan penguatan kelembagaan. Ketidakhahaman ini mengakibatkan pelaksanaan kegiatan cenderung tanpa tujuan dan perencanaan yang matang.

4. *Kurangnya kemampuan fasilitator lapangan melakukan adaptasi dengan masyarakat yang dibimbingnya.*

Beberapa fasilitator lapangan dianggap tidak mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, padahal fungsi fasilitator merupakan tempat bertanya masyarakat mengenai COREMAP.

5. *Intensitas LSM pendamping dan fasilitator lapangan di hampir semua lokasi COREMAP di Kabupaten Nias sangat rendah.*

Pada umumnya, fasilitator lapangan berada di lapangan hanya ketika ada kegiatan. Bahkan, banyak kasus fasilitator lapangan baru ada di lapangan menjelang akhir kegiatan dan program. Akibatnya, banyak kegiatan dan program yang berjalan tidak sesuai rencana, bahkan mengalami kegagalan.

Berbagai permasalahan dan kendala dalam pengelolaan COREMAP di tingkat kabupaten menyebabkan proses pembimbingan dan pengawasan terhadap fasilitator lapangan sebagai pendamping maupun LPSTK sebagai pelaksana program COREMAP di lokasi tidak berjalan dengan intensif. Hal ini membuat kegiatan fasilitator lapangan dan LPSTK tidak terawasi dan terbimbing dengan baik sehingga kinerjanya pun tidak optimal. Akibatnya, mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan program COREMAP di lokasi.

2.2. PENGELOLAAN COREMAP DI KEPULAUAN HINAKO

2.2.1 *Kegiatan dan Program*

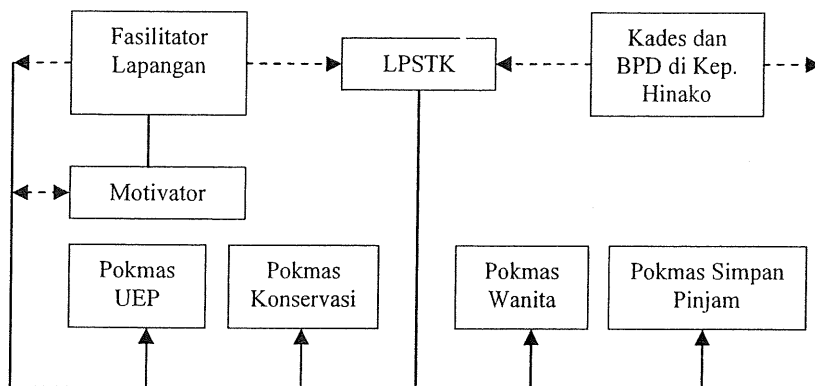
Sebagai lokasi yang relatif baru, pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang (LPSTK) di Kepulauan Hinako baru dilaksanakan pada tahun 2006, yaitu pada pelaksanaan COREMAP fase II di Kabupaten Nias. Ada dua

LPSTK yang dibentuk di wilayah ini, yaitu LPSTK Fananda dan LPSTK Nusantara. Wilayah kerja LPSTK Fananda meliputi enam desa yang berada di Pulau Hinako, yaitu Hinako, Balowondrate, Sinene'eto, Lahawa, Hanofa, dan Halamona. Sedangkan, wilayah kerja LPSTK Nusantara meliputi enam desa yang berada di pulau-pulau lain di wilayah Kepulauan Hinako, yaitu Bawasawa, Kafo-kafo, dan Tuwa-tuwa yang berada di Pulau Bawa; Imana dan Bawasalo'o yang berada di Pulau Bawa; serta Bogi yang berada di Pulau Bogi. Hal ini berbeda dengan LPSTK di kawasan lainnya yang mempunyai wilayah kerja hanya satu desa saja.

Selanjutnya, untuk memandu masing-masing LPSTK dalam mengelola terumbu karang serta menjalankan kegiatan dan program COREMAP, perwakilan masyarakat di Kepulauan Hinako dengan difasilitasi oleh LP3M Universitas Sumatera Utara melakukan musyawarah penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK). RPTK tersebut berisikan empat hal, yaitu (i) wilayah pengelolaan; (ii) prinsip, azas, kebijakan, dan arah pengelolaan; (iii) visi, sasaran, dan strategi pengelolaan; serta (iv) organisasi pengelolaan.

RPTK kemudian dijalankan oleh masing-masing kepengurusan LPSTK yang dipimpin oleh seorang ketua yang merupakan penduduk lokal dari salah satu desa yang dinaungi LPSTK tersebut. Dalam menjalankan setiap kegiatan dan program, masing-masing kepengurusan LPSTK diharuskan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan seluruh Kepala Desa dan BPD yang desanya dinaungi LPSTK tersebut, seperti yang terlihat pada Bagan 2.1. di bawah ini.

Bagan 2.1.
Struktur Organisasi Pelaksana Rencana Pengelola
Terumbu Karang LPSTK Fananda dan Nusantara,
Kepulauan Hinako



Keterangan:

————— : Masukan dan pendampingan

- - - - - : Koordinasi dan konsultasi

Sumber: RPTK LPSTK Nusantara, COREMAP 2006

Salah satu kegiatan yang harus dilakukan masing-masing LPSTK adalah pengelolaan sumber daya laut di Kepulauan Hinako. Pengelolaan sumber daya laut di Kepulauan Hinako dilakukan dengan sistem zonasi menjadi lima zona sesuai dengan panduan yang disusun di RPTK. Masing-masing zona memiliki peruntukan sendiri, seperti terlihat di pada Tabel 2.1. Penetapannya pun harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

Zona Inti/ Daerah Perlindungan Laut

Tujuan utama dibuatnya zona inti/daerah perlindungan laut (DPL) untuk mengatur dan mengendalikan aktifitas perikanan di wilayah yang memiliki fungsi sebagai tempat bertelur (*spawing ground*), pembesaran larva (*juvenile*), dan daerah asuhan

(*nursery ground*). Hal ini dilakukan untuk menjaga wilayah ini dari kegiatan penangkapan yang berlebihan untuk menjamin stok ikan dan biota laut lainnya secara berkelanjutan (RPTK-LPSTK Nusantara, 2006: 39). DPL LPSTK Fananda berada di Gosong Langu. Sedangkan, DPL LPSTK Nusantara berada di Gosong Pinang. Kedua tempat yang dijadikan lokasi DPL memiliki ekosistem terumbu karang dengan kondisi yang relatif lebih baik dibandingkan kondisi terumbu karang di tempat lain. Luas masing-masing DPL sekitar 70 hektar.

Tabel 2.1.
Zona Pengelolaan Sumber Daya Laut Kepulauan Hinako

Zona	Peruntukan	Kriteria
Zona Inti/ Daerah Perlindungan Laut (DPL)	Sebagai wilayah perlindungan. Tertutup/terlarang bagi aktifitas yang ekstraktif, kecuali untuk penelitian atas pengetahuan kepala desa.	Kondisi terumbu karang yang masih baik dan adanya kemudahan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.
Zona Penyangga	Sebagai wilayah penangkapan tradisional dengan alat tangkap pancing.	Wilayah yang keberadaannya mengitari wilayah inti/DPL sejauh radius 100 meter.
Zona Penangkapan Tradisional	Sebagai wilayah penangkapan nelayan tradisional dengan perahu dayung dan perahu motor di bawah 5 PK dengan alat tangkap tradisional yang tidak merusak terumbu karang.	Berada di luar zona inti, tetapi masih berada di lingkungan pesisir desa.
Zona Budidaya	Sebagai wilayah budidaya laut: budidaya ikan atau rumput laut	Berada di lingkungan pesisir desa. Pemanfaatannya atas izin kepala desa.
Zona Pengembangan Pariwisata	Sebagai wilayah untuk pengembangan atraksi dan fasilitas pendukung wisata	Harus berdasarkan konsep ekowisata dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, edukasi, dan berwawasan lingkungan.

Sumber: Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) LPSTK Nusantara, 2006

Zona Penyangga dan Zona Penangkapan Tradisional

Kedua zona ini ditetapkan sebagai wilayah penangkapan ikan bagi nelayan dengan syarat tertentu dan tidak merusak ekosistem

terumbu karang. Wilayah penangkapan ikan hanya terbatas di sekitar Kepulauan Hinako, yaitu paling utara adalah Pulau Asu dan paling selatan adalah Pulau Bawa. Wilayah di sekitar Gosong Langu dan wilayah di antara Pulau Imana, Bawa, Bogi, dan Hinako merupakan wilayah tangkapan favorit karena wilayah tersebut paling banyak ikannya. Pada saat musim angin barat, para nelayan biasanya menangkap ikan di sekitar Gosong Pinang dan pada saat musim angin tenggara, mereka biasanya menangkap ikan di sekitar Pulau Heruwanga. Pulau-pulau di sekitar wilayah tangkapan tersebut mampu melindungi dan mengurangi terpaan angin serta gelombang.

Zona Budidaya

Zona ini merupakan wilayah yang diperuntukkan untuk budidaya sumber daya laut, seperti budidaya ikan dan budidaya terumbu karang. Sejauh ini, belum ada satu pun usaha budidaya yang dilakukan di Kepulauan Hinako, padahal di beberapa bagian pesisir pantai berpotensi untuk dijadikan tempat budidaya apalagi setelah bertambahnya luas tanah di sekitar pantai akibat gempa. Contoh lokasi yang cocok untuk budidaya adalah laguna yang terdapat di Pantai Hinako. Budidaya rumput laut sebetulnya pernah diujicobakan dalam skala demplot, tetapi demplotnya rusak sebelum dipanen. Sampai sekarang belum ada lagi usaha untuk pengembangan budidaya sumber daya laut ini.

Zona Pengembangan Wisata

Sejauh ini, pengembangan wisata hanya dilakukan di Pulau Asu dan Pulau Bawa, yaitu sebagai tempat untuk berselancar. Padahal, kekayaan dan keindahan sumber daya alam yang ada di seluruh wilayah Kepulauan Hinako ini menjadikan semua wilayah di Kepulauan Hinako berpotensi untuk dilakukan pengembangan wisata.

Untuk lebih mempermudah menjalankan tugas dan fungsinya, LPSTK kemudian bersama-sama masyarakat membentuk kelompok masyarakat (POKMAS). Pokmas ini merupakan kumpulan orang-orang yang menangani kegiatan dan program COREMAP secara khusus. POKMAS yang dibentuk di Kepulauan Hinako ada empat, yaitu POKMAS Usaha Ekonomi Produktif (UEP), POKMAS Konservasi, POKMAS Wanita, dan POKMAS Simpan Pinjam. Sosialisasi tentang COREMAP di Kepulauan Hinako dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias pada tahun 2006 dengan bekerjasama dengan LSM pendamping yang menempatkan seorang fasilitator lapangan untuk mendampingi masyarakat dalam melaksanakan semua program COREMAP.

Selain membentuk kelembagaan, kegiatan lain yang dilakukan di Kepulauan Hinako adalah kegiatan pengawasan. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kelestarian terumbu karang di perairan Kepulauan Hinako. Kegiatan pengawasan dilakukan oleh pengurus LPSTK bersama anggota POKMAS Konservasi. Kegiatan yang dilakukan, di antaranya, adalah mengawasi aktivitas penangkapan ikan dan biota lainnya yang dilakukan nelayan dengan cara melakukan patroli. Pengurus LPSTK dan anggota POKMAS Konservasi mengupayakan pencegahan penggunaan cara-cara dan alat-alat destruktif dalam penangkapan ikan dan biota lainnya. Nelayan yang diketahui menggunakan cara-cara dan alat-alat destruktif diberikan peringatan dan pengarahan untuk tidak mengulangnya.

Selain itu, pengurus LPSTK dan POKMAS Konservasi secara khusus menjaga kelestarian terumbu karang di zona daerah perlindungan laut (DPL). DPL merupakan wilayah perlindungan/konservasi sehingga terlarang untuk kegiatan ekstraktif, seperti penangkapan ikan dan biota lainnya. Kegiatan yang boleh dilakukan hanyalah kegiatan penelitian. Itu pun harus sepengetahuan kepala desa. DPL yang diawasi LPSTK Fananda

berada di Gosong Langu dan DPL yang diawasi LPSTK Nusantara berada di Gosong Pinang. Luas masing-masing DPL sekitar 70 hektar. Informasi mengenai DPL lengkap dengan peta wilayah dan peraturannya dipasang dalam bentuk papan pengumuman besar di pelabuhan Desa Balowondrate. Dalam menjalankan kegiatan pengawasan ini, pengurus LPSTK dan anggota POKMAS Konservasi menggunakan satu buah kapal motor 10 GT bantuan COREMAP yang diberikan pada tahun 2006. Sebetulnya, kapal motor 10 GT yang diberikan COREMAP berjumlah dua buah, tetapi yang satu lagi digunakan sebagai alat transportasi Kepulauan Hinako-Sirombu PP.

Namun setelah tahun 2007, kegiatan COREMAP di Kepulauan Hinako menurun dengan sangat drastis. Menurut masyarakat setempat, pada tahun 2008 sama sekali tidak ada kegiatan COREMAP yang dilakukan di wilayah ini. Ketika ditanya penyebabnya, tidak diperoleh informasi yang memadai, pihak terkait termasuk DKP Kabupaten Nias, LSM pendamping, fasilitator yang pernah bertugas, pengurus LPSTK, dan masyarakat cenderung saling menyalahkan.

Kurangnya perhatian DKP Kabupaten Nias serta pendampingan dari LSM pendamping maupun fasilitator lapangan ditambah dengan kepengurusan LPSTK yang vakum membuat kegiatan COREMAP di wilayah ini memang sulit dilakukan.

2.2.2 Permasalahan dan Kendala Pelaksanaan COREMAP di Lokasi

Sebagaimana halnya pengelolaan di tingkat kabupaten, pelaksanaan COREMAP di Kepulauan Hinako juga mengalami beberapa kendala dan permasalahan. Sebagian dari kendala tersebut sangat terkait dengan permasalahan di tingkat kabupaten, sebagian lain karena kondisi geografis dan

karakteristik masyarakat setempat. Beberapa permasalahan tersebut antara lain adalah:

1. *Kurangnya bimbingan dan pendampingan baik dari DKP Kabupaten Nias, LSM pendamping, maupun fasilitator lapangan yang ditempatkan di lokasi.*

Beberapa masyarakat, termasuk pengurus desa setempat menginformasikan bahwa belum pernah ada orang dari DKP Kabupaten Nias sebagai penanggungjawab program yang datang ke wilayah mereka untuk memberi penjelasan mengenai maksud dan tujuan program COREMAP secara menyeluruh. Sementara itu, fasilitator yang ditempatkan di wilayah mereka jarang berada ditempat dan kurang bisa memberi bimbingan dengan baik.

2. *Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap maksud dan tujuan pelaksanaan COREMAP.*

Kegiatan COREMAP cenderung dianggap sebagai program bagi-bagi uang kepada masyarakat sebagaimana halnya bantuan yang diberikan kepada korban gempa yang banyak masuk ke wilayah ini. Akibatnya, ketika dilakukan pemilihan kepengurusan COREMAP baik LPSTK maupun POKMAS, masyarakat kurang memperhatikan latar belakang orang yang dipilih. Beberapa pengurus LPSTK termasuk ketua LPSTK bukan nelayan sehingga kurang memahami permasalahan terkait kenelayanan.

3. *Kurang harmonisnya hubungan antara sesama pengurus LPSTK dan antara LPSTK dengan masyarakat.*

Hal ini mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan COREMAP. Pengurus LPSTK tidak dapat bekerja optimal karena terpaksa bekerja sendiri. Menurut beberapa narasumber, salah satu penyebab ketidakberhasilan demplot rumput laut diwilayah mereka karena kurangnya

tanggung jawab pengelola sehingga program tersebut terlantar dan tidak terawat.

4. *Berbeda dengan masyarakat kepulauan pada umumnya, proporsi penduduk asli non-nelayan di beberapa desa di Kepulauan Hinako cukup tinggi.*

Mereka umumnya adalah pemilik kebun kelapa dan cengkeh yang relatif luas sehingga bagi sebagian masyarakat melaut hanya merupakan pekerjaan sampingan. Seorang narasumber mengatakan pada masa lalu sebagian besar masyarakat Hinako adalah para pemilik kebun yang luas dan mendatangkan orang dari luar kepulauan untuk bekerja di kebun mereka sebagai buruh. Hal ini mengakibatkan program COREMAP yang terkait dengan kenelayanan kurang diminati oleh sebagian masyarakat.

5. *Banyaknya penduduk Kepulauan Hinako yang pindah ke wilayah daratan (Kecamatan Sirombu, Pulau Nias) sebagai akibat dari gempa yang melanda wilayah ini pada awal tahun 2006.*

Pada waktu dilakukan penelitian lapangan, baik pada tahun 2007 maupun tahun 2009, sebagian besar masyarakat di kepulauan ini mengatakan memiliki rumah di Sirombu yang diperoleh secara cuma-cuma dari lembaga donor/bantuan untuk korban gempa. Beberapa di antara mereka memutuskan untuk menetap di daratan dan hanya datang ke Hinako pada waktu-waktu tertentu. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya melaksanakan program COREMAP yang membutuhkan kerja sama kelompok yang intensif.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sejak tahun 2007 tidak ada kegiatan COREMAP yang melibatkan masyarakat di Kepulauan Hinako. Oleh karena itu, pengumpulan data yang terkait dengan pengetahuan dan partisipasi masyarakat terkait kegiatan COREMAP tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

Beberapa masyarakat yang diwawancarai mempertanyakan tidak adanya kegiatan COREMAP di kepulauan ini sejak tahun 2007. Masyarakat merasa wilayah mereka kurang mendapat perhatian dari *DKP Kabupaten Nias*. Sayangnya, hal ini tidak dapat dikonfirmasi kepada pihak terkait. Ketua LPSTK Fananda tidak dapat ditemui karena sudah pindah ke kabupaten lain menyusul pengangkatannya sebagai pegawai negeri sipil. Pengurus LPSTK lain yang ditemui mengatakan bahwa selama ini ketua bekerja sendiri dan tidak pernah melibatkan pengurus lain sehingga pengurus lain tidak mengetahui kegiatan apa saja yang seharusnya dilakukan di wilayah mereka. Sementara itu, Kepala *DKP Kabupaten Nias* mengaku kurang paham terhadap permasalahan COREMAP karena baru bertugas. Dari pengamatan di lapangan, hampir tidak ada tanda-tanda keberlangsungan program COREMAP di wilayah ini. Tidak sedikit masyarakat yang bertanya kepada peneliti mengenai keberadaan dan keberlangsungan program COREMAP di wilayah mereka. Pertanyaan ini tentu saja tidak dapat dijawab oleh peneliti dengan memuaskan, karena keberlangsungan COREMAP sangat ditentukan oleh pemerintah setempat dan *DKP Kabupaten Nias* sebagai PIU yang bekerjasama dengan Bank Pembangunan Asia.

BAB III

PENDAPATAN MASYARAKAT DAN PERUBAHANNYA

Kepulauan Hinako merupakan salah satu dari lokasi COREMAP yang ada di Kabupaten Nias. Dalam rangka persiapan implementasi COREMAP di lokasi ini telah dilakukan beberapa kegiatan yang dimulai pada tahun 2005/2006, di antaranya: sosialisasi, pembentukan kelembagaan, penyusunan RPTK, pembuatan DPL, pemberian bantuan kapal untuk transportasi dan pengawasan serta pembuatan demplot rumput laut. Namun, Sampai dengan tahun 2009, kegiatan pengelolaan berbasis masyarakat yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana bergulir belum dilaksanakan.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan COREMAP di lokasi ADB adalah kenaikan pendapatan per kapita sebesar dua persen per tahun. Untuk memantau kenaikan pendapatan masyarakat ini dilakukan studi baseline sosial ekonomi yang dilakukan pada tahun 2007 dan BME sosial ekonomi yang telah dilaksanakan pada tahun 2009. Hasil dari BME sosial ekonomi yang dibandingkan dengan hasil baseline studi sosial ekonomi akan memberikan gambaran perubahan pendapatan masyarakat selama rentang waktu dua tahun.

Deskripsi mengenai pendapatan penduduk ini akan dilihat dari pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita. Pendapatan rumah tangga yang dimaksudkan disini adalah penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang bekerja dari pekerjaan pokok maupun tambahan. Jumlah pendapatan yang diterima oleh orang yang bekerja adalah pendapatan bersih,

sebagai contoh pendapatan dari kegiatan kenelayanan merupakan pendapatan bersih setelah dikurangi biaya produksi, seperti ongkos BBM dan ransum (gula, teh dan kopi, beras dll). Demikian pula dengan dari kegiatan non-kenelayanan, seperti pertanian dan perdagangan. Pendapatan yang diterima oleh petani adalah pendapatan bersih yang diterima setelah dikurangi biaya produksi, seperti pupuk dan obat-obatan. Sementara itu, pendapatan dari sektor perdagangan adalah rata-rata keuntungan yang diperoleh dalam satu bulan (keterangan lebih lanjut lihat pada lampiran). Sedangkan pendapatan per kapita adalah pendapatan rumah tangga dibagi dengan semua anggota rumah tangga, baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja.

Uraian mengenai pendapatan penduduk pada bagian ini akan dibagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama, uraian mengenai pendapatan rumah tangga dan per kapita dari semua penduduk yang bekerja di berbagai lapangan dan jenis pekerjaan yang ada di lokasi. Bagian kedua, deskripsi tentang pendapatan penduduk rumah tangga dari kegiatan kenelayanan. Khusus pendapatan dari kegiatan kenelayanan akan dirinci menurut musim, yang dibagi ke dalam musim gelombang lemah, musim pancaroba, dan musim gelombang kuat. Bagian terakhir merupakan penutup yang berisi deskripsi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat.

3.1. PERUBAHAN PENDAPATAN RATA-RATA RUMAH TANGGA DAN PER KAPITA.

Tabel 3.1. menunjukkan distribusi rumah tangga menurut besar pendapatan dari hasil baseline studi yang dilakukan tahun 2007 (T0) dan hasil dari BME sosial ekonomi tahun 2009. Secara umum, dari perbandingan hasil baseline dan BME sosial ekonomi terdapat peningkatan pendapatan rumah tangga, meskipun kenaikannya tidak signifikan. Jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000 menunjukkan

sedikit penurunan dari sekitar 80 persen menjadi sekitar 72 persen. Seiring dengan menurunnya rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000, jumlah rumah tangga yang berpendapatan di atas Rp 1.000.000 mengalami sedikit peningkatan. Pada tahun 2007, rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 1.000.000 hanya berjumlah sekitar 5 persen meningkat menjadi sekitar 11 persen pada tahun 2009.

Tabel 3.1.
Distribusi Rumah Tangga Terpilih
Menurut Besar Pendapatan,
Di Tiga Desa Lokasi COREMAP di Pulau Hinako,
Kabupaten Nias, Tahun 2007 dan 2009 (Persen)

No	Kategori Pendapatan	Tahun 2007 (T0)		Tahun 2009 (T1)	
		Frekuensi	Persen	Frekuensi	Persen
1	<Rp 500.000	74	80,4	60	72,3
2	Rp 500.000 - Rp 999.000	13	14,1	13	15,7
3	Rp 1.000.000 - Rp 1.499.000	4	4,3	4	4,8
4	Rp 1.500.000 - Rp 1.999.000	0	0	2	2,4
5	Rp 2.000.000 - Rp 2.499.000	0	0	1	1,2
6	Rp 2.500.000 - Rp 2.999.000	0	0	2	2,4
7	Rp 3.000.000 - Rp 3.499.000	1	1,1	0	0
8	>Rp 3.500.000	0	0	1	1,2
Jumlah		100	100	100	100
N		92		84	

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.

Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

Sejalan dengan menurunnya jumlah rumah tangga yang berpendapatan di bawah Rp 500.000 dan naiknya proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas Rp 1.000.000, hasil BME sosial ekonomi tahun 2009 juga menunjukkan adanya kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga dan pendapatan per kapita. Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa pendapatan rata-rata rumah tangga naik dari sekitar Rp 366.270 menjadi Rp 487.300. Dengan demikian, selama dua

tahun terjadi peningkatan pendapatan rumah tangga sebesar Rp 32.800 atau terjadi kenaikan sebesar 33 persen. Jika dikaitkan dengan distribusi pendapatan (lihat pada Tabel 3.1.) yang menunjukkan adanya sedikit peningkatan jumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas satu juta rupiah dapat disimpulkan bahwa kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga lebih disebabkan oleh naiknya pendapatan oleh sekelompok kecil rumah tangga ini. Sedangkan, sebagian besar lainnya tetap mempunyai pendapatan yang tidak meningkat yang jumlahnya di bawah satu juta.

Data pada tabel 3.2. juga memperlihatkan masih adanya perbedaan yang cukup signifikan antara pendapatan minimum dan maksimum. Pada tahun 2007, pendapatan rumah tangga terendah sebesar Rp 4.100, di lain pihak terdapat rumah tangga yang mempunyai pendapatan sebesar Rp 3.000.000. Pendapatan yang hanya sekitar Rp 4.000 ini tentu saja sangat kecil, hanya cukup untuk membeli satu kilogram beras. Pada tahun 2009, pendapatan terendah sedikit mengalami kenaikan menjadi Rp 20.800, sementara pendapatan tertinggi meningkat menjadi Rp 3.800.000 atau meningkat sekitar Rp 800.000.

Dari data pada tabel 4.2. juga dapat diketahui bahwa median pendapatan sebesar Rp 264.580. Jika dibandingkan dengan pendapatan rata-rata rumah tangga yang nilainya sebesar Rp 366.270, nilai median pendapatan rumah tangga ini lebih rendah. Perbedaannya mencapai sekitar Rp 101.690. Dari nilai median ini dapat diketahui bahwa sebagian besar rumah tangga di Kepulauan Hinako mempunyai pendapatan sekitar Rp 260.000. Dengan demikian nilai median ini lebih mendekati gambaran pendapatan rumah tangga di Kepulauan Hinako. Dua tahun kemudian perbedaan antara pendapatan rata-rata rumah tangga dan media pendapatan rumah tangga semakin melebar. Pendapatan rata-rata rumah tangga sebesar Rp 487.300 sementara median pendapatannya sebesar Rp 225.000. Data ini

lebih memberikan penjelasan bahwa kenaikan pendapatan rata-rata rumah tangga di P Hinako ini lebih dikarenakan oleh meningkatnya sejumlah rumah tangga yang mempunyai pendapatan di atas satu juta, sementara sebagian besar rumah tangga pendapatannya tidak meningkat.

Pada tahun 2007, pendapatan per kapita penduduk di tiga desa lokasi COREMAP yang merupakan pendapatan total dari seluruh penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk sebesar Rp 97.300. Dua tahun kemudian pendapatan ini meningkat menjadi Rp 130.170 atau mengalami kenaikan kurang lebih 33 persen. Nilai pendapatan per kapita ini lebih rendah dari nilai garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut data dan informasi mengenai kemiskinan yang dikelurakan BPS, minimal pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 108.535.

Tabel 3.2.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga
Desa Hinako, Halamona, dan Sineneeto (Kep Hinako)
Tahun 2007 dan 2009 (Rupiah)

Pendapatan per Bulan	Tahun 2007	Tahun 2009
Per-kapita	97.300	130.170
Rata-rata rumah tangga	366.270	487.300
Median	264.580	225.000
Minimum pendapatan RT	4.166	20.800
Maksimum pendapatan RT	3.000.000	3.907.800

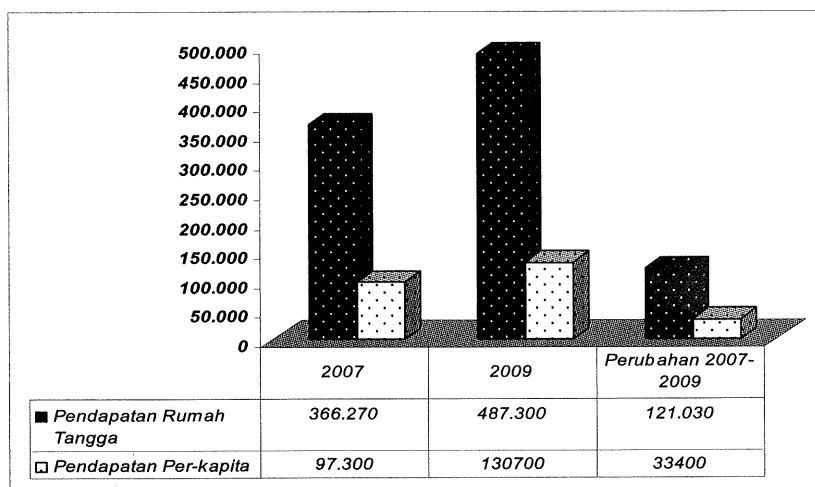
Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.

Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

Pendapatan per kapita di tiga desa lokasi COREMAP di Pulau Hinako ini sangat rendah. Terlebih jika dibandingkan dengan harga sembilan kebutuhan pokok yang relatif tinggi di daerah ini. Sebagai gambaran harga beras kualitas sedang di Gunung Sitoli (ibukota Kabupaten Nias) sebesar Rp 7.000 per kg, sesudah sampai di Hinako menjadi Rp 9.000 per kg. Demikian pula

dengan harga gula pasir di Gunung Sitoli sebesar Rp 10.000 per kg, sesudah sampai di Pulau Hinako menjadi Rp 12.000 per kg. Tingginya harga sembako di wilayah ini disebabkan ongkos transportasi yang cukup mahal dan terbatasnya sarana transportasi umum yang ada.

Diagram 3.1
Perubahan Pendapatan Rumah Tangga dan Per-Kapita Tahun 2007-2009 Kepulauan Hinako, Kabupaten Nias



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.

Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

3.2. PERUBAHAN PENDAPATAN DARI KEGIATAN KENELAYANAN

Bagian ini terfokus pada pendapatan dari kegiatan kenelayanan yang merupakan pekerjaan dari sebagian masyarakat Kepulauan Hinako. Gambaran pendapatan dari kegiatan kenelayanan ini didasarkan pada data kuantitatif hasil survei dan juga data kualitatif dari wawancara terbuka. Untuk memberikan gambaran

yang lebih komprehensif tentang pendapatan dari kegiatan kenelayanan, deskripsi pendapatan akan dilihat menurut musim yaitu musim gelombang lemah, pancaroba, dan musim gelombang kuat. Pada tahun 2007, hasil survei menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga yang salah satu sumber penghasilannya dari kegiatan kenelayanan sekitar 19 rumah tangga. Jumlah rumah tangga ini pada tahun 2009 menurun menjadi 18 rumah tangga.

Rata-rata pendapatan rumah tangga

Hasil survei menunjukkan bahwa pada tahun 2009 pendapatan rumah tangga yang bersumber dari kegiatan kenelayanan menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2007. Pada tahun 2007 pendapatan rata-rata rumah tangga yang bersumber dari kegiatan kenelayanan sebesar Rp 330.617 naik menjadi Rp 789.800 pada tahun 2009. Dengan demikian, selama dua tahun terjadi kenaikan pendapatan rumah tangga yang bersumber dari kegiatan kenelayanan sebesar 140 persen.

Perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah pendapatan yang terendah dan tertinggi masih tetap terjadi, baik pada tahun 2007 maupun tahun 2009. Pada tahun 2007, pendapatan terendah dari kegiatan kenelayanan sebesar Rp 60.000 dan tertinggi sebesar Rp 1.270.000. Dua tahun kemudian pendapatan terendah naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp 190.000 dan pendapatan tertinggi meningkat menjadi sekitar Rp 2.500.000 (atau naik hampir dua kali lipat). Perbedaan pendapatan yang cukup signifikan ini kemungkinan terkait dengan jenis armada dan alat tangkap dipakai serta intensitas penangkapan pada masing-masing nelayan.

Nelayan di Kepulauan Hinako, pada umumnya, merupakan nelayan yang masih sederhana dengan alat tangkap pancing dan armada tangkap perahu motor dan perahu tanpa motor. Selama

dua tahun tidak terjadi perkembangan yang berarti berkaitan dengan peralatan dan teknologi yang dipakai. Dengan peralatan yang sederhana tersebut wilayah tangkap nelayan juga sangat terbatas. Di samping itu, intensitas melaut juga relatif rendah. Terdapat dua pola memancing bagi nelayan di Kepulauan Hinako. Pola pertama, memancing pada siang hari yang dimulai dari jam 4 pagi sampai dengan jam 2 siang. Sedangkan pola kedua, memancing pada malam hari yang dimulai pada jam 8 malam dan pulang pada jam 7 pagi. Dengan teknologi dan pola melaut tersebut, hasil yang diperoleh juga tidak maksimal.

Tabel 3.3.
Statistik Pendapatan Rumah Tangga
dari Kegiatan Kenelayanan
Desa Hinako, Halamona, dan Sineneeto (Kep. Hinako) Tahun
2007 - 2009

Pendapatan	2007	2009
Rata-rata rumah tangga	330.617	789.800
Median	270.000	588.300
Minimum pendapatan RT	60.000	190.000
Maksimum pendapatan RT	1.270.000	2.587.500

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.

Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

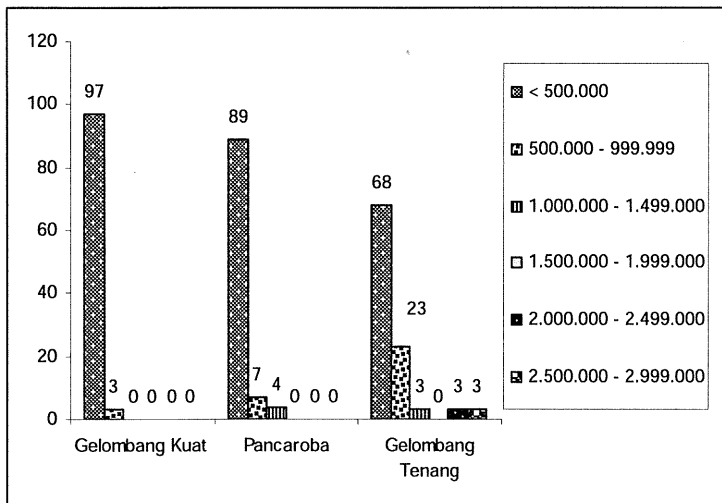
Pendapatan rumah tangga dari kegiatan nelayan menurut musim

Perubahan pendapatan nelayan menurut musim terlihat dari perbandingan distribusi pendapatan tahun 2007 dan 2009. Dari hasil perbandingan tersebut terlihat bahwa perubahan yang cukup signifikan terjadi pada kelompok rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 500.000 dan kelompok rumah tangga yang mempunyai pendapatan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000. Perbandingan hasil baseline dan BME menunjukkan

bahwa di semua musim proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 turun secara signifikan. Sebaliknya, yang mempunyai pendapatan antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000 mengalami kenaikan yang signifikan.

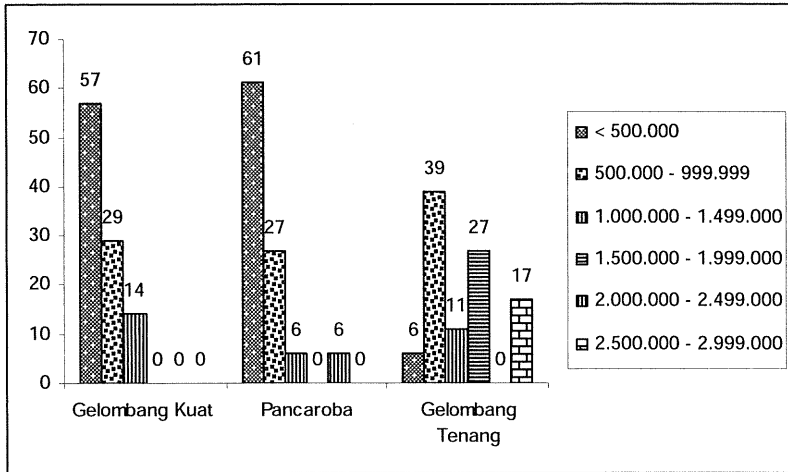
Jika dilihat per musim, penurunan proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan kurang dari Rp 500.000 yang sangat signifikan terjadi pada musim gelombang tenang. Pada tahun 2007, proporsi rumah tangga yang mempunyai pendapatan di bawah Rp 500.000 sebesar 68 persen turun menjadi hanya 6 persen pada tahun 2009. Sedangkan, penurunan yang kurang signifikan terjadi pada musim pancaroba, yaitu proporsi rumah tangga yang berpendapatan kurang dari Rp 500.000 turun dari 89 persen menjadi hanya sekitar 61 persen.

Diagram 3.2.
Distribusi Rumah Tangga yang Mempunyai
Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan
Menurut Kelompok Pendapatan, Tahun 2007



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.

Diagram 3.3.
Distribusi Rumah Tangga yang Mempunyai
Pendapatan dari Kegiatan Kenelayanan
Menurut Kelompok Pendapatan, Tahun 2009



Sumber: Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan berfluktuasi menurut musim. Pada musim gelombang lemah, pendapatan nelayan cenderung tinggi dibandingkan pada musim gelombang kuat atau pancaroba. Demikian pula kondisinya pada masyarakat Hinako yang mempunyai penghasilan dari kegiatan kenelayanan. Perbedaan pendapatan pada musim gelombang kuat dibandingkan pada musim gelombang lemah cukup menonjol. Jika dilihat perkembangannya, perbedaan tersebut cenderung semakin melebar. Data pada Tabel 3.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2007 dalam musim gelombang lemah pendapatan rata-rata rumah tangga dari kegiatan kenelayan sekitar Rp 558.600 dan dalam musim gelombang kuat sebesar Rp 185.900. Pada tahun 2009, rata-rata pendapatan di musim gelombang lemah sebesar Rp 1.768.600 dan pada musim gelombang kuat sebesar Rp 482.140.

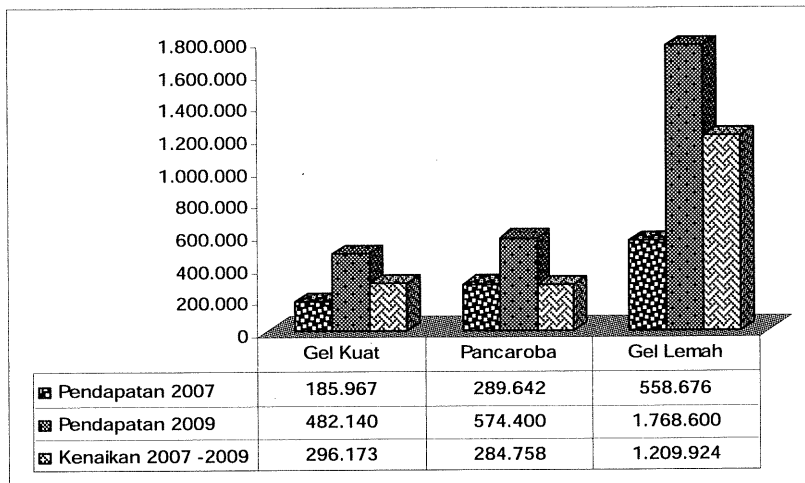
Secara umum, pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan menurut musim memperlihatkan peningkatan antara tahun 2007 dan 2009. Peningkatan terbesar terjadi pada musim gelombang lemah dan peningkatan terkecil terjadi pada musim pancaroba. Pada musim gelombang lemah, peningkatan pendapatan rumah tangga mencapai hampir tiga kali lipat dengan kenaikan dari Rp 558.676 menjadi Rp 1.768.600 atau naik sebesar Rp 1.290.900. Sebaliknya, pada musim pancaroba kenaikan pendapatan hanya mencapai Rp 284.758 (Diagram 3.4.).

Tabel 3.4.
Pendapatan Rumah Tangga
dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim
Desa Hinako, Halamona, dan Sineneeto (Kep. Hinako)
Tahun 2007 (Rupiah)

Pendapatan	Musim		
	Ombak Lemah	Pancaroba	Ombak Kuat
Tahun 2007			
Rata-rata rumah tangga	558.676	289.642	185.967
Median	357.500	230.000	140.000
Minimum rumah tangga	50.000	45.000	40.000
Maksimum rumah tangga	3.400.000	1.170.000	600.000
Tahun 2009			
Rata-rata rumah tangga	1.768.600	574.400	482.140
Median	1.300.000	375.000	400.000
Minimum rumah tangga	350.000	100.000	20.000
Maksimum rumah tangga	7.200.000	2.600.000	1.400.000

Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.
 Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

Diagram 3.4
Pendapatan Rumah Tangga
dari Kegiatan Kenelayanan Menurut Musim
Desa Hinako, Halamona dan Sineneeto (Kep. Hinako)
Tahun 2007 dan 2009 (Rupiah)



Sumber: Data Primer, Survei Data Dasar Aspek Sosial Terumbu Karang Indonesia, COREMAP-LIPI, 2007.

Data Primer BME Sosial Ekonomi, COREMAP-LIPI, 2009

3.3. FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PENDAPATAN

Hasil survei menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Hinako sedikit mengalami kenaikan pada kurun waktu 2007-2009. Pendapatan rumah tangga di Desa Hinako pada tahun 2007 sekitar Rp 366.270 dan pada tahun 2009 menjadi Rp 487.300 atau mengalami kenaikan sekitar Rp 121.030. Jika dihitung persentase kenaikannya, selama dua tahun pendapatan rumah tangga di desa ini naik sekitar 33 persen. Sementara itu, pendapatan per kapitanya mengalami kenaikan sebesar Rp 32.870. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita sebesar Rp 97.300 naik menjadi Rp 130.170 atau

mengalami kenaikan 33 persen. Pendapatan rumah tangga mengalami kenaikan yang cukup besar, mencapai lebih dari 115 persen. Pada tahun 2007 rata-rata pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan sebesar Rp 270.000 naik menjadi Rp 588.000 pada tahun 2009.

Pembangunan Pascagempa

Faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pendapatan rumah tangga desa Hinako, di antaranya, adalah bencana alam gempa bumi yang diikuti tsunami pada 26 Desember 2004 dan gempa bumi tanpa diikuti tsunami pada 29 Maret 2005. Bencana ini sangat berpengaruh terhadap pendapatan rumah tangga nelayan. Survei yang dilakukan pada tahun 2007, mungkin, memberikan gambaran pendapatan terendah dari sektor kelautan karena sebagian besar nelayan saat itu belum bangkit. Namun demikian, nelayan bukanlah satu-satunya jenis pekerjaan penduduk desa. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa basis utama penduduk desa adalah pertanian tanaman keras, yaitu utamanya kelapa dan sebagian kecil cengkeh. Tenggelamnya sektor kelautan masih memungkinkan mereka yang selama masa itu tergantung pada laut mengalihkan pekerjaannya ke sektor pertanian.

Naiknya pendapatan rumah tangga pada survei tahun 2009 dibandingkan pada survei tahun 2007 kemungkinan juga berkaitan dengan keadaan bencana alam itu. Walaupun bencana alam itu bukan merupakan berkah bagi mereka, namun pada kenyataannya ada keuntungan yang datang sesudah terjadinya bencana alam itu, yakni proyek-proyek pembangunan yang melibatkan tenaga kerja lokal. Upah yang diperoleh bisa diperhitungkan sebagai sumber pendapatan sesaat bagi rumah tangga mereka. Sesudah bencana gempa bumi dan tsunami, Kepulauan Hinako dan penduduknya merupakan salah satu sasaran pemberian bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi

pembangunan yang dikendalikan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. Selain itu, aktifitas beberapa LSM domestik dan internasional yang menyalurkan bantuan bagi korban bencana alam, baik berupa pembangunan perumahan di Sirombu maupun kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kepulauan Hinako, juga memberikan tambahan pendapatan.

Berkaitan dengan pembangunan pascagempa Nias pada tahun 2007, terdapat sebuah LSM yang mempunyai kegiatan yang bertujuan memberdayakan ekonomi masyarakat Kepulauan Hinako. Kegiatan yang dilakukan LSM tersebut, diantaranya, adalah memberikan bantuan perahu untuk beberapa nelayan Hinako. Pembuatan perahu dilakukan oleh pengelola LSM dengan melibatkan penduduk desa Hinako yang akan menerima bantuan perahu. Dalam mengerjakan pembuatan perahu tersebut, penduduk desa mendapatkan upah harian dari pengelola LSM. Setelah pembuatan perahu selesai, perahu-perahu tersebut langsung dipakai oleh penduduk yang menerima bantuan. Pada saat penelitian ini dilakukan terdapat beberapa perahu yang telah diserahkan dan digunakan masyarakat Kepulauan Hinako.

Selain pemberian bantuan perahu, LSM ini juga mempunyai kegiatan memproduksi Virgin Coconut Oil (VCO). Kegiatan ini mempekerjakan beberapa anggota masyarakat Kepulauan. Anggota masyarakat tersebut diberikan upah tetap setiap bulannya. Kelapa sebagai bahan baku pembuatan VCO ini dibeli dari masyarakat Kepulauan Hinako dengan harga yang lebih layak.

Meskipun masih dalam skala kecil kegiatan LSM ini memberikan pengaruh pada kegiatan ekonomi penduduk. Sebagian anggota masyarakat yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan dapat menjadi pekerja di LSM ini. Petani kelapa pun mendapatkan keuntungan karena mereka tidak perlu menjual kelapanya ke Sirombu sehingga menghemat biaya pemasaran. Selain itu, harga

beli yang lebih layak memungkinkan terjadinya peningkatan pendapatan bagi petani kelapa. Demikian pula dengan pemberian bantuan perahu, jika digunakan secara baik oleh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2009, kegiatan LSM ini sudah berakhir. Tidak ada lagi tanda-tanda kegiatan yang dilakukan oleh LSM tersebut. Dengan berakhirnya kegiatan LSM ini, penduduk setempat tidak bisa lagi memperoleh tambahan pendapatan sebagai pekerja upahan. Akan tetapi beberapa perahu yang telah dibagikan ke penduduk masih dapat digunakan untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan pendapatan dari kegiatan di laut.

Program pemerintah lainnya

Pada saat studi dilakukan, di Kepulauan Hinako hampir tidak terlihat program pemerintah yang berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga dalam jangka panjang, khususnya bagi rumah tangga nelayan, seperti penyaluran dana bergulir untuk industri kecil pengolahan ikan. Yang terlihat hanya program pembangunan fisik yang dibiayai PNPM Mandiri, seperti pengerasan jalan setapak, pembangunan dermaga, dan program pembangunan fasilitas air bersih. Program pembangunan fisik ini dilakukan sejak tahun 2008. Dari berbagai program pembangunan fisik ini, masyarakat mendapatkan tambahan pendapatan dengan bekerja sebagai tukang batu, tukang kayu, dan tenaga kasar lainnya. Selain itu, semua penduduk Hinako dimasukkan ke dalam kategori miskin yang berhak mendapat dana BLT dan menerima beras raskin. Program BLT dan raskin ini dalam jangka pendek membantu kondisi ekonomi masyarakat Desa Hinako.

Dari hasil kajian ini dapat diketahui bahwa program pemerintah yang dijalankan di kepulauan ini, pada umumnya, kurang menyentuh aspek pendapatan secara langsung dalam jangka

panjang karena lebih berorientasi pada pembangunan fisik dan pemberian bantuan langsung yang berorientasi jangka pendek. Program-program yang mengarah pada pengembangan ekonomi produktif yang pada kenyataannya sangat dibutuhkan penduduk karena semakin sulitnya sumber-sumber mata pencaharian justru kurang dikembangkan. Hampir bisa dipastikan bahwa naik turunnya pendapatan rumah tangga di kepulauan ini lebih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam yang ada dan kemampuan sumber daya manusia dalam mengolah sumber daya alam tersebut menjadi pangan/makanan yang layak konsumsi dan bisa dipasarkan dengan teknologi seadanya. Selain itu cara distribusi hasil pengolahan sumber daya alam tersebut juga sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan mereka.

Faktor Budaya

Faktor budaya juga memainkan peranan yang penting dalam peningkatan pendapatan penduduk Kepulauan Hinako. Sumber daya alam yang mereka miliki sangat terbatas pada lahan yang ditumbuhi pohon kelapa. Sebagai pewaris petani kelapa, teknologi yang mereka gunakan juga sangat sederhana. Masyarakat kurang memelihara tanaman kelapa secara optimal. Rumput ilalang dibiarkan saja sehingga pohon kelapa kurang berproduksi secara maksimal. Selain itu sejauh ini masyarakat juga tidak melakukan peremajaan pohon kelapa. Pohon kelapa yang baru merupakan pohon kelapa yang secara alamiah tumbuh dari buah kelapa yang tidak diambil.

Budaya yang dipengaruhi dalam pengelolaan perkebunan kelapa ini berimbas pada budaya kenelayanan mereka. Bisa dikatakan bahwa di kalangan nelayan orientasi individu lebih menonjol. Hasil tangkapan biasanya digunakan untuk keperluan rumah tangga sendiri dan tidak didistribusikan kepada kelompok. Hasil tangkapan ikan sudah dijual kepada sesama penduduk. Hal ini menunjukkan adanya orientasi komersial pada budaya

kenelayan mereka. Namun demikian, karena teknologi yang mereka gunakan sangat sederhana dan hasil tangkapannya pun juga kecil, sektor kelautan ini belum bisa memberikan jaminan sumber penghidupan yang bisa diandalkan.

Tidak berkembangnya budaya masyarakat baik di sektor pertanian maupun kelautan merupakan faktor yang berpengaruh terhadap upaya untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga mereka. Dibutuhkan intervensi program yang besar untuk mengubah budaya masyarakat yang berorientasi pada kelompok atau komunitas menuju pada budaya pasar atau komersial. Demikian pula dengan sektor kelautan yang pada kenyataannya membutuhkan program yang jauh lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mulai dari teknologi penangkapan, kesiapan budaya mereka untuk hidup dari sumber daya laut, orientasi pasar, dan pengelolaan yang kompetitif dengan nelayan-nelayan lain yang sudah lebih maju di sekitarnya, seperti di Sibolga dan Medan.

Peran COREMAP

Implementasi COREMAP di kepulauan ini sangat terlambat. Sampai tahun 2009, belum ada pelaksanaan pengelolaan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) berupa penyaluran dana bergulir kepada POKMAS. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan COREMAP berkaitan dengan permasalahan pengelolaan COREMAP, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Sebelum terjadi pemekaran (tahun 2009), pengelolaan COREMAP ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias. Setelah pemekaran, pengelolaan COREMAP diambil alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi. Belum adanya kegiatan MPA ini berimplikasi pada tidak adanya pengaruh COREMAP dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. KESIMPULAN

Setelah kurang lebih 4,5 tahun COREMAP dilaksanakan di Kabupaten Nias ada dua hal penting yang perlu dicermati dan dilihat hasilnya. Pertama, apakah ada permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam mengelola program? Kedua, bagaimanakah pelaksanaan program di tingkat lokasi dan dampaknya bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya peningkatan pendapatan masyarakat.

Berikut ini beberapa temuan pokok dari hasil kajian BME Sosial Ekonomi yang dikelompokkan menjadi dua. Pertama, temuan terkait dengan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan program di tingkat kabupaten, provinsi, dan lokasi. Temuan pokok yang kedua adalah gambaran perubahan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan COREMAP di Kepulauan Hinako, Kabupaten Nias.

4.1.1. Permasalahan dan Kendala dalam Pengelolaan COREMAP di Tingkat Kabupaten dan Provinsi

Pengelolaan Program

1. *Pelaksanaan program dan kegiatan lebih banyak bersifat top down.*

Jenis dan bentuk kegiatan COREMAP ditentukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias tanpa memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lokasi COREMAP. Akibatnya, beberapa program dan kegiatan tidak cocok dilaksanakan di lokasi karena tidak sesuai dengan

kebutuhan dan keinginan masyarakat di lokasi. Hal ini mengakibatkan sebagian besar program gagal karena kurang partisipasi dari masyarakat. Beberapa contoh program yang gagal adalah budidaya kepiting di Muawo dan budidaya ikan lele di Lahewa.

2. *Keterbatasan sumber daya manusia di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, baik dari aspek kuantitas maupun kualitas.*

Akibatnya, pengelolaan program-program COREMAP tidak optimal. Monitoring dan pendampingan program hampir tidak pernah dilaksanakan sehingga beberapa permasalahan di lapangan tidak dapat ditangani dengan tepat dan segera.

3. *Sistim rotasi dan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang kurang terencana.*

Pengelola COREMAP, termasuk pimpinan dan staf yang sebelumnya menangani COREMAP dipindahkan dan diganti dengan orang baru yang tidak paham dan tidak mempunyai latar belakang keilmuan ataupun pengalaman yang sesuai. Akibatnya, pengelolaan COREMAP pun menjadi tidak optimal.

4. *Tata kelola/manajemen pengelolaan COREMAP, baik di tingkat kabupaten (DKP Kabupaten Nias) maupun di tingkat lokasi (LPSTK) tidak berjalan dengan baik.*

Hal ini dibuktikan sulitnya mendapatkan laporan pelaksanaan program dan kegiatan COREMAP.

5. *Kegiatan dan program COREMAP masih diperlakukan dan dipahami sebagai proyek dan belum dianggap sebagai program berkelanjutan.*

Akibatnya, apabila jangka waktu dan dananya habis, kegiatan dan program COREMAP tersebut akan berakhir begitu saja tanpa adanya keinginan dilanjutkan secara mandiri.

6. *Selama masa peralihan pasca pemekaran wilayah Kabupaten Nias, sebelum dinas-dinas di Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat terbentuk, pengelolaan COREMAP diambil-alih oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara.*

Pengambil-alihan ini di satu pihak dapat meningkatkan pelaksanaan COREMAP di Kabupaten Nias yang selama ini dianggap kurang berhasil karena kinerja PIU yang kurang baik. Namun hal ini memerlukan strategi yang baik agar pelaksanaan pendampingan dan monitoring program dari provinsi dapat berjalan sesuai dengan rencana, mengingat jauhnya jarak yang jauh. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola COREMAP di tingkat provinsi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Pendampingan

1. *Sulitnya mendapatkan LSM pendamping dan tenaga pendamping/fasilitator yang berkualitas dan profesional.*

Hal ini terjadi karena terbatasnya LSM dan fasilitator yang ada di Kabupaten Nias.

2. *Sistem kerjasama antara DKP dan LSM pendamping berupa kontrak selama satu tahun yang kemudian dapat diperpanjang lagi.*

Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya perencanaan dan program yang dilakukan LSM pendamping karena ketidakpastian keberlanjutan kontrak.

3. *Rekrutmen fasilitator pendamping yang dilakukan LSM juga berupa sistem kontrak yang dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh kedua belah pihak.*

Hal ini mengakibatkan sering terjadi pergantian fasilitator lapangan karena kontraknya selesai atau fasilitator lapangan minta berhenti. Akibatnya frekuensi pergantian fasilitator lapangan sangat tinggi dan berdampak pada terputusnya keberlanjutan kegiatan pendampingan. Fasilitator lapangan pengganti pada umumnya belum sepenuhnya memahami kegiatan dan program yang sedang berjalan.

4. *Kurangnya pemahaman LSM pendamping dan fasilitator lapangan tentang misi dan tujuan COREMAP secara komprehensif.*

Pemahaman tentang adanya pembagian tahapan dalam kegiatan COREMAP tampaknya belum sepenuhnya dimengerti oleh LSM pendamping maupun fasilitator lapangan.

5. *Kurangnya kemampuan fasilitator lapangan melakukan adaptasi dengan masyarakat yang dibimbingnya.*

Beberapa fasilitator lapangan dianggap tidak mampu beradaptasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, padahal fungsi fasilitator merupakan tempat bertanya masyarakat mengenai COREMAP.

6. *Intensitas LSM pendamping dan fasilitator lapangan di hampir semua lokasi COREMAP di Kabupaten Nias sangat rendah.*

Pada umumnya, fasilitator lapangan berada di lapangan hanya ketika ada kegiatan. Bahkan, banyak kasus fasilitator lapangan baru ada di lapangan menjelang akhir kegiatan dan program. Akibatnya, banyak kegiatan dan program yang berjalan tidak sesuai rencana, bahkan mengalami kegagalan.

4.1.2. Permasalahan dan Kendala di Tingkat Lokasi

1. *Kurangnya sosialisasi, bimbingan dan pendampingan, baik dari DKP kabupaten Nias, LSM pendamping, maupun fasilitator yang ditempatkan di desa.*

Hal ini mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan pelaksanaan COREMAP. Kegiatan COREMAP cenderung dianggap sebagai program bagi-bagi uang kepada masyarakat sebagaimana halnya bantuan yang diberikan kepada korban gempa yang banyak masuk ke wilayah ini.

2. *Dua LPSTK sudah terbentuk, yaitu LPSTK Fananda dan Nusantara, tidak berjalan dan tidak berfungsi dengan optimal.*

Keberadaan kedua lembaga ini hanya di atas kertas saja. Pengurus LPSTK, secara *de facto* tidak pernah melakukan kegiatan, seperti pertemuan atau mendapat pelatihan dari pengelola di tingkat kabupaten dan provinsi. Karena tidak adanya kegiatan LPSTK, sebagian masyarakat juga kurang memahami maksud dan tujuan dari adanya LPSTK. Berbagai kegiatan COREMAP yang pernah dilakukan oleh LPSTK (demplot rumput laut, pengawasan/patroli laut) kurang disosialisasikan/dikomunikasikan ke masyarakat. Kurang adanya komunikasi antara pengurus LPSTK, aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum dapat berpotensi menimbulkan konflik di antara masyarakat. Rendahnya pemahaman masyarakat akan maksud dan tujuan COREMAP ini mempengaruhi partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk mendukung pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang akan dilakukan.

4.1.3. Gambaran Perubahan Pendapatan Masyarakat dan Faktor yang Berpengaruh

Gambaran perubahan pendapatan

1. *Secara umum pendapatan masyarakat di Kepulauan Hinako relatif rendah.*

Hasil BME menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2007-2009 terjadi peningkatan pendapatan penduduk di ketiga desa lokasi COREMAP di Kepulauan Hinako. Berdasarkan baseline studi tahun 2007, pendapatan rata-rata rumah tangga yang berasal dari semua sumber penghasilan sebesar Rp 366.270. Dua tahun kemudian, hasil BME menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga ini naik menjadi Rp 487.300. Sejalan dengan kenaikan pendapatan rumah tangga, pendapatan per-kapita yang merupakan total dari seluruh penduduk yang bekerja dibagi dengan jumlah penduduk di tiga lokasi penelitian juga menunjukkan kenaikan sebesar selama dua tahun. Pada tahun 2007, pendapatan per kapita penduduk di kepulauan ini sebesar Rp 97.300 naik menjadi Rp 130.170 pada tahun 2009. Besar pendapatan per-kapita ini lebih kecil dari nilai garis kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Menurut data dan informasi mengenai kemiskinan yang dikeluarkan BPS, minimal pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp 108.535.

Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan juga menunjukkan kenaikan dari Rp 330.600 pada tahun 2007 menjadi Rp 789.800 pada tahun 2009 atau naik sebesar Rp 459.200. Kenaikan pendapatan dari kegiatan kenelayanan ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan pendapatan rumah tangga dari seluruh sumber pendapatan. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan intensitas penangkapan

hasil laut oleh masyarakat. Jika pada tahun 2007, pendapatan rumah tangga lebih banyak disumbangkan oleh kegiatan ekonomi dari pertanian (kelapa), maka pada tahun 2009 kegiatan kenelayan lebih menonjol dan menyumbang cukup besar terhadap pendapatan rumah tangga.

2. *Pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayan sangat dipengaruhi oleh musim.*

Pada musim gelombang kuat (angin kencang), pendapatan rumah tangga yang bersumber dari kegiatan kenelayan menurun drastis hingga hanya sekitar sepertiga sampai seperempat dari pendapatan yang diperoleh pada musim gelombang tenang (teduh). Sementara itu, pada musim pancaroba, pendapatan rumah tangga dari hasil melaut menjadi hanya sekitar separuh dari pendapatan pada musim tenang. Perbedaan pendapatan menurut musim ini dikarenakan keadaan alam yang tidak memungkinkan para nelayan melaut pada musim gelombang kuat mengingat armada tangkap yang dipakai secara umum masih sederhana.

3. *Dari hasil kajian ini dapat diketahui bahwa umumnya program pemerintah kurang menyentuh aspek pendapatan secara langsung karena lebih berorientasi fisik.*

Program-program yang mengarah pada pengembangan ekonomi produktif yang pada kenyataannya sangat dibutuhkan penduduk desa karena semakin sulitnya sumber-sumber mata pencaharian justru kurang dikembangkan di desa ini. Program PNPM Mandiri yang sebenarnya bisa diarahkan kepada peningkatan usaha ekonomi masyarakat, digunakan untuk pembangunan fisik sarana desa, seperti pembangunan jalan setapak dan dermaga. Meskipun bergitu, secara tidak langsung sebagian masyarakat juga mendapatkan keuntungan dari pembangunan tersebut dengan menjadi

pekerja upahan. Namun, jumlahnya relatif kecil dan hanya menyentuh sebagian masyarakat yang terlibat pembangunan. Program COREMAP yang salah satu kegiatannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan mata pencaharian alternatif (MPA) belum dilakukan di kepulauan ini. Oleh karena itu, hampir bisa dipastikan bahwa naik turunnya pendapatan rumah tangga desa ini sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alam dan bagaimana cara masyarakat mengolah dan menggunakannya untuk memperoleh penghasilan melalui usaha pertanian dan perikanan tangkap.

4.2. SARAN

Program dan kegiatan yang dirancang untuk pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem terumbu karang secara berkesinambungan dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan perlu mempertimbangkan berbagai isu-isu penting yang muncul berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut dan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan masyarakat. Berdasarkan berbagai permasalahan dan kendala yang terungkap dalam kajian ini, berikut beberapa alternatif masukan untuk dapat dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan COREMAP di Kepulauan Hinako.

Pengelolaan di tingkat provinsi

1. *Jarak yang cukup jauh, transportasi yang terbatas, dan pengaruh cuaca yang tidak memungkinkan setiap saat melakukan monitoring menjadi hambatan bagi pengelola di tingkat provinsi untuk melakukan pendampingan dan monitoring program dan kegiatan secara intensif.*

Untuk itu perlu merekrut LSM pendamping yang dapat melakukan pendampingan secara intensif dan lebih profesional di beberapa lokasi COREMAP di Kabupaten Nias Utara dan Barat.

2. *Pendampingan yang dilakukan oleh LSM yang telah direkrut oleh pengelola COREMAP di tingkat kabupaten selama ini sangat minim.*

Hal tersebut terkait dengan sistem perekrutan LSM yang dilakukan melalui kontrak. Oleh karena itu perlu melakukan pembenahan dalam melakukan perekrutan. Profil LSM yang direkrut menjadi pertimbangan utama. Idealnya profil LSM yang terpilih adalah LSM yang mempunyai personil yang selain mempunyai keahlian teknis di bidang budidaya atau teknologi tepat guna juga yang bisa berinteraksi dengan masyarakat. Selain itu, kontrak kerja sama perlu diformulasikan secara rinci sehingga apabila pihak LSM tidak melaksanakan tugasnya sesuai kontrak, pihak pengelola dapat menindak secara tegas.

Pengelolaan di tingkat lokasi

1. *Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan COREMAP perlu segera ditindaklanjuti oleh pengelola COREMAP tingkat provinsi.*

Hal ini untuk menghindari konflik dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap program COREMAP yang telah tertunda pelaksanaannya di wilayah ini. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi tentang tujuan program COREMAP yang lebih intensif. Sosialisasi ini dapat dilakukan oleh fasilitator atau pengelola COREMAP dari provinsi bekerja sama dengan tokoh informal di desa (tokoh adat dan tokoh agama). Pelibatan tokoh setempat diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan, partisipasi, dan kepedulian

masyarakat terhadap pentingnya COREMAP dilaksanakan di wilayah ini.

2. *Berkaitan dengan kevakuman kegiatan LPSTK, perlu dilakukan peremajaan dan pembenahan kepengurusan LPSTK.*

Hal ini penting dilakukan mengingat LPSTK, merupakan lembaga yang dipersiapkan untuk melakukan pengelolaan program dan kegiatan COREMAP di tingkat lokasi.

3. *Dalam melakukan perencanaan kegiatan MPA perlu mempertimbangkan pengalaman di desa lain yang menjadi lokasi COREMAP di Kabupaten Nias.*

Berbagai kegiatan MPA gagal karena jenis kegiatan yang dilakukan ditentukan dari kabupaten. Dalam hal ini aspirasi dari masyarakat tentang jenis kegiatan yang akan dilakukan kurang direspon oleh pengelola di tingkat kabupaten. Selain mempertimbangkan aspirasi masyarakat, jenis kegiatan MPA yang akan dilakukan perlu juga mempertimbangkan potensi sumber daya alam setempat, ketrampilan masyarakat dan alternatif potensi pasarnya.

4. *Alternatif kegiatan MPA di Kepulauan Hinako tidak hanya tergantung pada kegiatan kenelayanan.*

Terdapat beberapa alternatif sumber pendapatan di luar sektor perikanan yang dapat dikembangkan, diantaranya, adalah peningkatan pengelolaan perkebunan kelapa dan pengolahan pascapanennya. Selama ini kegiatan pengelolaan perkebunan kelapa tidak dilakukan secara intensif, karena kekurangan tenaga kerja. Perkebunan kelapa kurang terawat sehingga produksinya menurun. Peremajaan tanaman kelapa juga kurang dilakukan sehingga kebanyakan tanaman kelapa sudah tua. Hal ini tentunya mempengaruhi produksi kelapa.

Untuk itu program peremajaan pohon kelapa juga merupakan usaha yang perlu dikembangkan.

5. *Potensi perikanan Kep Hinako yang cukup besar belum dimanfaatkan secara optimal.*

Selama ini yang berkembang hanya kegiatan perikanan tangkap yang umumnya dipasarkan dalam bentuk ikan segar. Kegiatan berkaitan dengan budidaya perikanan dan penanganan pascapanen belum berkembang, padahal pengembangan usaha berkaitan dengan budidaya perikanan dan penanganan pascapanen dapat memberikan nilai tambah bagi nelayan, terutama dalam meningkatkan pendapatan. Untuk itu, diversifikasi usaha terkait dengan budidaya dan penanganan pascapanen pengolahan hasil laut berpotensi untuk dikembangkan.

6. *Ikan yang menjadi target utama para nelayan (hanya bisa) langsung dipasarkan di pasar lokal (pemuahan kebutuhan di dalam desa).*

Karena permintaan ikan di tingkat desa relatif kecil jumlahnya, pada umumnya target tangkapan ikan nelayan hanya sekitar 6 sampai paling banyak 15 ikat ikan. Para nelayan tidak mau meningkatkan hasil tangkap karena takut tidak akan terjual semua. Dalam rangka meningkatkan hasil tangkap nelayan beberapa alternatif upaya yang bisa dilakukan adalah: penyediaan sarana pemasaran ikan yang dilengkapi dengan boks pendingin. Dengan adanya sarana ini maka hasil tangkapan nelayan dapat ditampung dengan jumlah yang cukup, sehingga sebarangpun hasil tangkapan nelayan akan terjual. Dengan adanya sarana pemasaran diharapkan dapat merangsang nelayan untuk meningkatkan hasil tangkapannya.

7. *Belajar dari pengalaman pelaksanaan kebijakan dan progam berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut yang telah*

dilaksanakan di Kepulauan Hinako dan memperhatikan kondisi dan karakteristik sosial ekonomi penduduknya, implementasi COREMAP perlu memperhatikan beberapa aspek sosial dan kependudukan.

Beberapa isu sosial kependudukan yang perlu mendapat perhatian adalah:

- *Administrasi pencatatan kependudukan yang pada umumnya tidak sesuai dengan tempat tinggal penduduk.*

Hampir di semua desa di Kepulauan Hinako mempunyai pola yang sama dalam pencatatan kependudukan. Seorang tetap dicatat sebagai penduduk desa asal, walaupun telah pindah tempat tinggalnya di wilayah daratan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian bagi pengelola COREMAP di daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan COREMAP, seperti pembentukan POKMAS dan kelompok lainnya. Sistem pencatatan kependudukan yang agak unik ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik jika tidak dilakukan secara musyawarah.

- *Banyaknya bantuan yang langsung diserahkan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan yang terkena dampak gempa mengakibatkan sebagian masyarakat menjadi 'tergantungan' pada bantuan.*

Karena banyaknya bantuan langsung yang diterima masyarakat, kemandirian pun menjadi luntur. Mereka cenderung 'manja' dan berharap mendapat bantuan terus, baik dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Kondisi ini perlu diantisipasi oleh pengelola COREMAP baik di tingkat provinsi/kabupaten maupun di tingkat lokasi, jika mau melaksanakan kegiatan di tingkat

desa seperti pemberian pinjaman bergulir untuk pengembangan mata pencaharian alternatif (MPA).

- *Minimnya kemampuan, pengalaman, dan jenis ketrampilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam usaha budidaya menjadi tantangan dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui program COREMAP.*

Adanya keberhasilan usaha budidaya, seperti keberhasilan usaha budidaya pertanian yang telah dikembangkan oleh beberapa petani yang umumnya berasal dari luar desa (pendatang) dapat dijadikan contoh bahwa berhasilnya usaha budidaya memerlukan waktu, tidak seperti usaha perikanan tangkap yang hasilnya segera bisa dinikmati.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, BAPPENAS, UNFPA, CIDA, AusAID dan Nzaid, 2005.
Penduduk dan Kependudukan Nias Paska Gempa dan Tsunami, Hasil Sensus Penduduk Nias dan Nias Selatan 2005
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2007.
Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase II (COREMAP II). Jakarta: DKP
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias, 2006
Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK), Desa-desa Kepulauan Hinako, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias.
- Data Penduduk Desa Botohilitano, Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan.
- Laiya, Bambowo, 1989.
Solidaritas Kekeluargaan Masyarakat Nias. Yogyakarta: Gama Press.
- Suharsono, 2007.
Pengelolaan Terumbu Karang di Indonesia: Orasi Pengukuhan Profesor Riset Bidang Biologi Laut. LIPI: 2007.

